

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TINGKAT
KECAMATAN**

**(Studi Pada Pelaksanaan Musrenbang Di Kecamatan Kencong,
Kabupaten Jember)**

SKRIPSI

Oleh:

OSKAR JANATA AGASI AL HILAL

NIM 115030600111011



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MINAT STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
MALANG
2016**

MOTTO

“Belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan, man
jadda wajadah dengan bersungguh pasti meraih kesuksesan”

(Oskar Janata Agasi Al Hilal)



LEMBAR PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan kepada Abah, Umik, adekku, dan sahabat yang selalu berdoa dan memberikan dorongan dengan sepenuh hati mengiringi penulis selama menggali ilmu dan potensi diri.



UCAPAN TERIMAKASIH

Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dan dukungan dari orang-orang terdekat saya, untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapak Ir. H. Sujono dan Ibu Hj. Marifah yang selalu memberi restu dan motivasi serta mendoakanku tiada henti.
2. Adikku Mitra yang selalu ceria.
3. Bapak Dr. Abdullah Said, M.Si selaku ketua komisi pembimbing.
4. Bapak M. Chazienul Ulum, S.sos, MPA selaku anggota komisi pembimbing.
5. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik.
7. Sahabat seperjuangan dan gak ada matinya, Reza, Fery, Ilyas, Darma, Tantok, Dimas.
8. Sahabat stay young yang selalu ngehits dan penuh warna, Tythalita, Miak Banana, Sheila Banana, Dyan si bos, dan Nando dayu.
9. Sahabat dari tim kudis yang menggila dan selalu mengajak ngopi, Pasa, Iqbale, Mbak Nopita, Om arie, Deri dargameboot, Angger, Kyki, Anggi.
10. Sahabat Perencanaan Pembangunan 2011 yang selalu kompak dan selalu bersama.
11. Untuk semua pihak yang telah membantu yang tidak saya sebutkan satu per satu. Terima kasih.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSRENBANG TINGKAT
KECAMATAN (Studi Pada Pelaksanaan Musrenbang Di Kecamatan
Kencong, Kabupaten Jember)
Disusun Oleh : Oskar Janata Agasi Al Hilal
NIM : 115030600111011
Fakultas : Ilmu Administrasi
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan

Malang, 01 Oktober 2015

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Abdullah Said M.Si

NIP. 1980501 198403 1 001



M. Chazienu Ulum, S.sos.MPA

NIP. 19740614 200501 1 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 19 November 2015
 Jam : 09.00 WIB
 Skripsi atas nama : Oskar Janata Agasi Al Hilal
 Judul : Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Tingkat Kecamatan (Studi Pada Pelaksanaan Musrenbang Di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember)

DINYATAKAN LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Abdullah Said, M.Si
 NIP. 1980501 198403 1 001

Anggota 1



M. Chazienul Ulum, S.Sos, MPA
 NIP. 19740614 200501 1 001

Anggota 2



Erlita Cahvasari, S.AP, M.AP
 NIK. 2011078 60724 2 001

Anggota 3



Nuriati Widodo, S.AP, M.AP
 NIK. 83012903110275



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsure-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Malang, 07 Oktober 2015

Mahasiswa



Nama: Oskar Janata Agasi Al Hilal

NIM : 115030600111011

RINGKASAN

OSKAR JANATA AGASI ALHILAL, 2015, **Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Tingkat Kecamatan (Studi pada Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)**, Dr. Abdullah Said, M.Si selaku Ketua Komisi Pembimbing, dan Mochammad Chazienul Ulum, S.Sos, MPA selaku Anggota Komisi Pembimbing, 106 halaman + xiv

Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan pada beberapa isu mengenai perencanaan pembangunan di Kecamatan yang berdasarkan pada kekuatan masyarakat dimana partisipasi masyarakat menjadi dasar perencanaan pembangunan di Kecamatan. Dalam kaidah perencanaan partisipasi masyarakat sangat diperlukan sekali untuk mendukung perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang bersifat *bottom-up*. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa juga mendefinisikan faktor-faktor yang berpengaruh di dalam partisipasi Masyarakat melalui realisasi pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Kencong kabupaten Jember.

Jenis penelitian ini dengan deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan yaitu Miles dan Huberman, data yang digunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui data pendukung di lapangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, sedangkan data sekunder dari wawancara tanya jawab atau wawancara secara langsung dengan narasumber di lapangan dengan hasil penggalian informasi yang berhubungan sesuai dengan fokus penelitian yang sudah tercantumkan.

Penelitian memperoleh hasil yang menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif di Kecamatan Kencong dilaksanakan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) cukup baik dalam keterlibatan masyarakat, pelaksanaan ini telah menghasilkan serangkaian tahap pembangunan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengelolaan sumberdaya dengan baik, dan peningkatan kesehatan maupun sarana infrastruktur penunjang kesejahteraan masyarakat, meskipun masih ada beberapa faktor sebagai penghambat pelaksanaan. Sesuai hasil tersebut dapat disarankan bahwa, perlu adanya sosialisasi mengenai tingkat kebutuhan yang disampaikan oleh masyarakat, anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, dan adanya reward-reward khusus pelaksanaan dimana hal tersebut mempengaruhi terhadap rasa partisipasi masyarakat dalam Musrenbang.

SUMMARY

OSKAR JANATA AGASI ALHILAL, 2015, **Public Participation in the Development Planning Meeting (MUSRENBANG) Kecamatan Level (Study on Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)**, Dr. Abdullah Said, M.Si as the Chairman of the Advisory Committee, and M. Chazienul Ulum, S. Sos, MPA as members of the Advisory Committee, 106 pages + xiv

The research was conducted based on a number of issues concerning the development planning in the district which is based on the strength of communities where community participation is the basis of the development planning in the Kecamatan. Public participation in the planning rules are very desirable to support the planning and implementation of the development that is bottom-up. This thesis aims to identify and analyze also defines the factors that influence participation in society through the realization of the implementation of the Development Planning Meeting (MUSRENBANG) in the Kecamatan Kencong, Jember.

This type of research with qualitative descriptive approach. The analysis that used is Miles and Huberman, the data used are primary and secondary data. The primary data obtained directly through the supporting data in a field related to the object under study, while the secondary data from the interview question and answer or direct interviews with sources in the field by extracting information related to the results according to the research focus has been included.

The research obtain results which indicate that development planning activities which are participatory in Kecamatan Kencong implemented through the Development Planning Meeting (MUSRENBANG) good enough for civil participation, this implementation has resulted in a series of stages of development with the aim of improving people's welfare, community development, job creation, good resource management, and improving the health and welfare of the community supporting infrastructure, although there are still some factors as a barrier to implementation. According to the results it can be suggested that, should the level of socialization of the need expressed by the community, which is owned by the government budget, and the specific implementation of reward-reward actions that affect the sense of community participation in Musrenbang.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TINGKAT KECAMATAN “**. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (SAP) pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si, selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Bapak Dr. Abdullah Said, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.
4. Bapak M. Chazienul Ulum, S.Sos, MPA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi hingga selesai.

5. Untuk kedua orang tua, adek, dan sahabat saya yang selalu memberi motivasi dan mendoakan saya.
6. Bapak Ir. H. Sujono selaku Pejabat Kepala Kantor Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.
7. Bapak Bukhori, SH, M.Si selaku wakil dari BAPPEKAB Kabupaten Jember.
8. Bapak Bambang Erwin selaku Kasi PMD dan Skretaris pelaksana Musrenbang Kecamatan Kencong.
9. Bapak Didik selaku Skretaris Desa dan peserta dalam Murenbang Kecamatan Kencong.
10. Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu persatu.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, baik dalam teknik penyajian materi maupun pembahasan. Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya tulis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang , Mei 2015

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
LEMBAR PERSEMBAHAN	ii
UCAPAN TERIMAKASIH	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
SUMMARY	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi Penelitian	10
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Perencanaa	13
1. Pengertian Perencanaan	13
2. Ciri-ciri Konsep Perencanaan	15
3. Tahapan dalam Perencanaan	17
B. Teori Pembangunan	20
1. Pengertian Pembangunan	20
2. Prinsip Pembangunan	23
3. Paradigma Pembangunan	26
C. Teori Partisipasi	27
1. Pengertian Partisipasi	27
2. Partisipasi dalam Perspektif Administrasi Publik	29
3. Tingkatan Partisipasi Masyarakat	30
4. Perencanaan Partisipatif	35
D. Pemerintah Daerah	45
1. Pengertian Pemerintah Daerah	45
2. Prinsip dan Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	47
3. Pemerintah Kecamatan	50

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	52
B. Fokus Penelitian	52
C. Lokasi dan Situs Penelitian	53
D. Jenis dan Sumber Data	54
E. Teknik Pengumpulan Data	55
F. Instrumen Penelitian	57
G. Analisis Data	58

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Peneliti	60
1. Kondisi Geografis Kabupaten Jember	60
2. Kondisi Topografis	60
3. Demografi	64
4. Sosial dan Budaya	67
5. Kelembagaan Pemerintah Daerah	72
6. Sejarah Kecamatan Kencong	73
7. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan	74
8. Kondisi Wilayah Geografis dan Demografis	75
9. Keadaan Sosial	78
10. Organisasi Sosial Kemasyarakatan	80
11. Kondisi Kesejahteraan Penduduk	80
12. Potensi Sumberdaya Alam	81
13. Potensi Perhubungan	81
14. Kondisi Aparatur Kecamatan	82
B. Penyajian Data	82
1. Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	82
a. Kemitraan/Kesetaraan	82
b. Pendelegasian Kekuasaan dan Wewenang	87
c. Pengawasan Masyarakat	90
2. Faktor Pendukung dan Penghambat	91
C. Pembahasan	96
1. Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang	97
a. Kemitraan/Kesetaraan	97
b. Pendelegasian Kekuasaan dan Wewenang	99
c. Pengawasan Masyarakat	101
2. Faktor Pendukung dan Penghambat	102

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	106
B. Saran	109

DAFTAR PUSTAKA	111
-----------------------------	------------

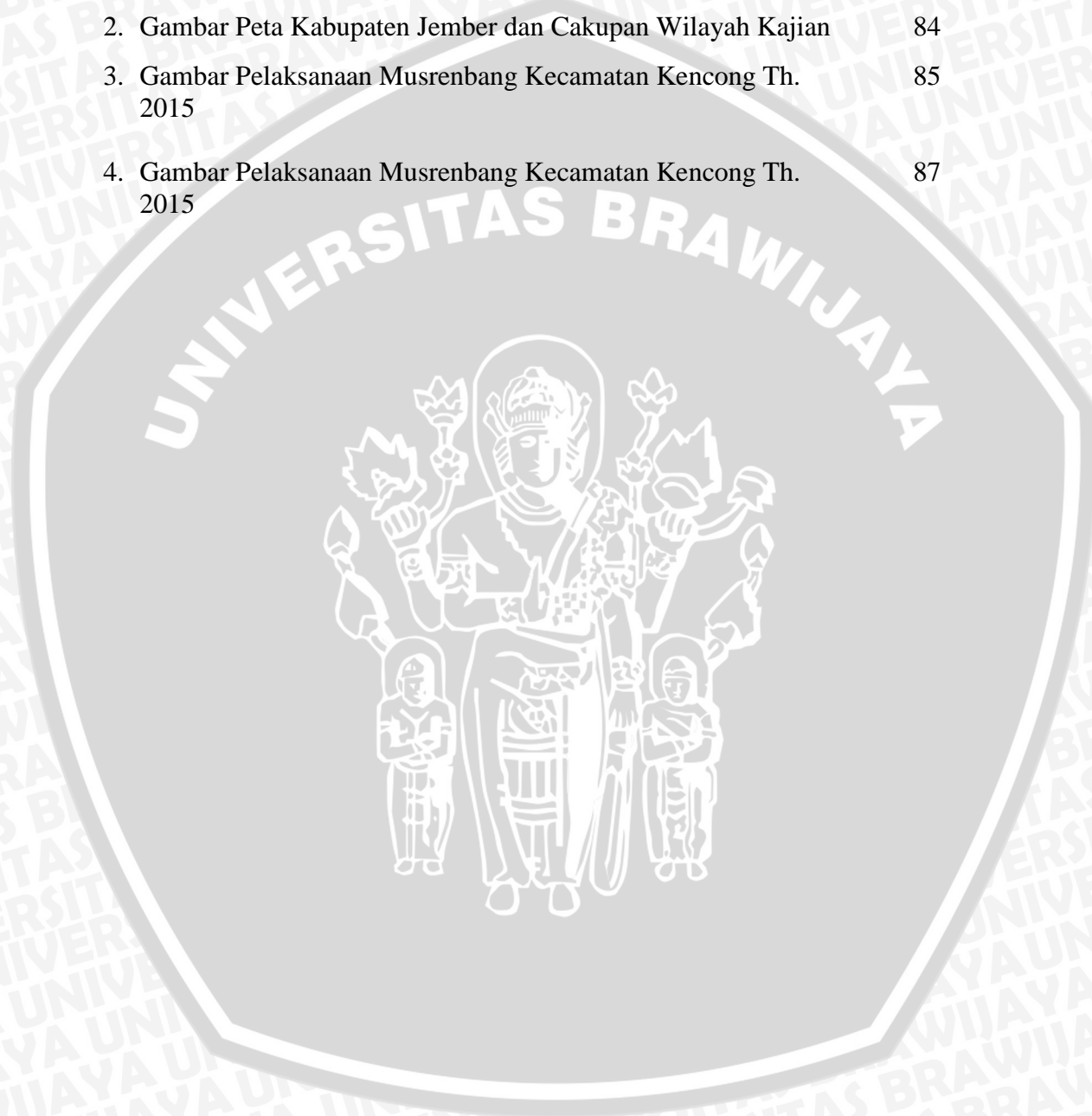


DAFTAR TABEL

NO.	JUDUL	HAL.
1.	Tabel Model Delapan Anak Tangga Partisipasi Masyarakat	32
2.	Tabel Program Pembangunan: Pemberdayaan Versus Ketergantungan	33
3.	Tabel Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)	40
4.	Tabel Nama, Luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa	61
5.	Tabel Banyaknya sekolah dan kelas negeri dan swasta tahun pelajaran 2010/2011	67
6.	Tabel 2.9: Jumlah penduduk miskin per kecamatan	68
7.	Tabel 2.10: Jumlah rumah per kecamatan	71
8.	Tabel Tinggi, Luas dan Jarak Kantor Desa dengan Ibukota Kecamatan	77
9.	Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Kencong Berdasarkan Jenis Kelamin	77
10.	Tabel Model Delapan Anak Tangga Partisipasi Masyarakat	97

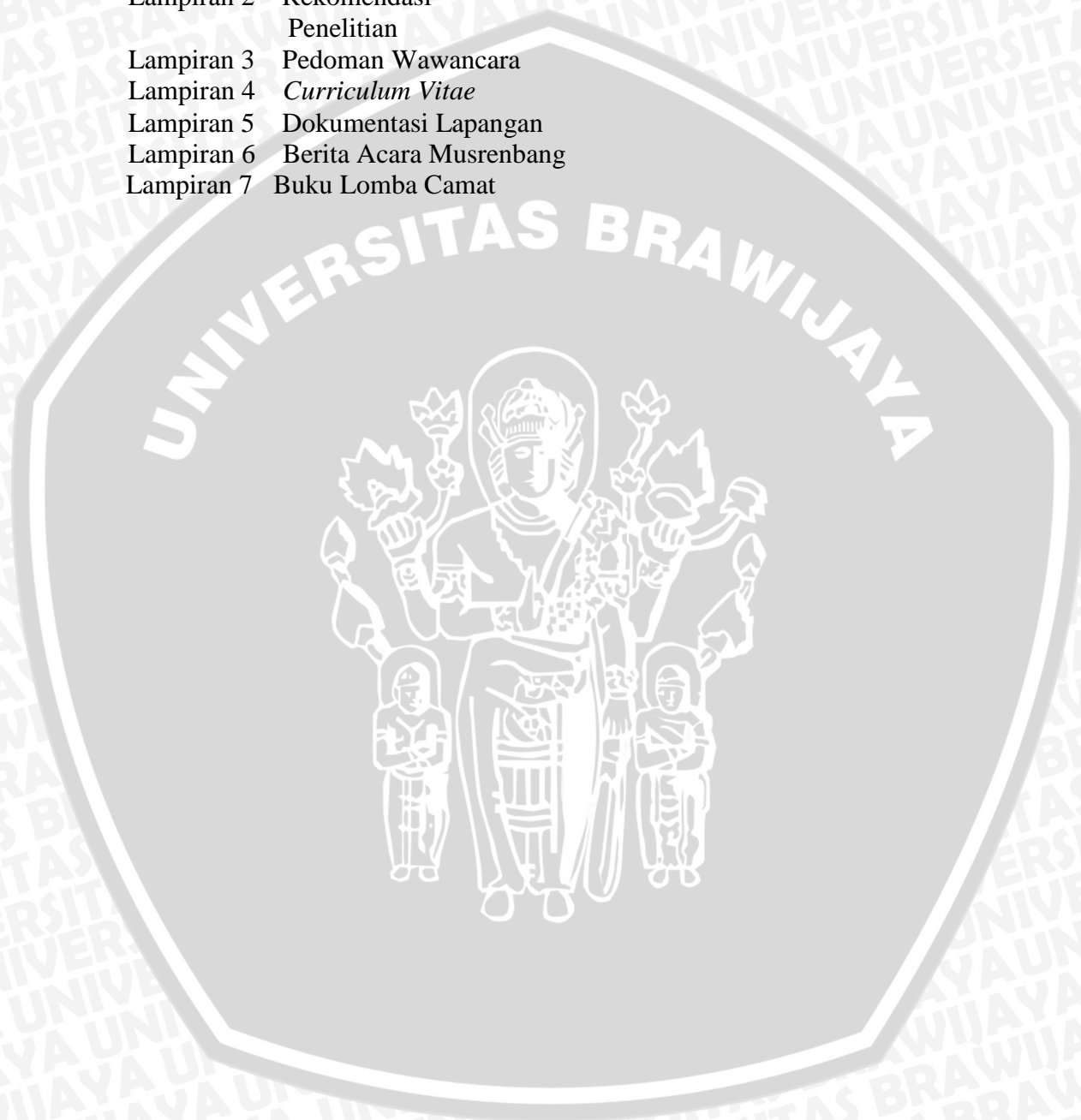
DAFTAR GAMBAR

NO.	JUDUL	HAL.
1.	Gambar Perencanaan Pembangunan Daerah	48
2.	Gambar Peta Kabupaten Jember dan Cakupan Wilayah Kajian	84
3.	Gambar Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kencong Th. 2015	85
4.	Gambar Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kencong Th. 2015	87



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Pengantar Riset
- Lampiran 2 Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 3 Pedoman Wawancara
- Lampiran 4 *Curriculum Vitae*
- Lampiran 5 Dokumentasi Lapangan
- Lampiran 6 Berita Acara Musrenbang
- Lampiran 7 Buku Lomba Camat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan sebuah perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur dan alami. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara berkembang yang giat melaksanakan pembangunan dalam berbagai bidang secara menyeluruh. Sebuah pembangunan harus ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat dan maka dari itu diperlukan perencanaan dalam pembangunan untuk merumuskan tercapainya kesejahteraan masyarakat tersebut. Berjalan dan berhasil atau tidaknya sebuah pembangunan tergantung pada semangat dan komitmen dari seluruh masyarakat maupun pihak yang terkait, serta daya dukung, disiplin dan tanggung jawab seluruh aparat pemerintah.

Sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam tujuan pembangunan nasional, maka pembangunan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan secara bertahap. Untuk menentukan hakikat yang ada dalam upaya pembangunan nasional maka dapat dilihat dari dua aspek, yaitu: “sebagai upaya perubahan struktural yang mendasar dalam jangka panjang dan upaya untuk menanggulangi gejala ekonomi jangka pendek.”(Tjokroamidjojo, 1993: 67).

Pada dasarnya pembangunan merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan kesejahteraan serta meningkatkan kualitas hidup suatu bangsa. Oleh karenanya untuk mencapai tujuan-tujuan dalam pembangunan tersebut diperlukan sebuah perencanaan, strategi, dan kebijakan yang tepat sehingga hasil yang diperoleh terhadap pembangunan dapat maksimal dan terdistribusi secara adil merata.

Sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan yang berhasil harus dilakukan perencanaan yang maksimal, dimana perencanaan yang dimaksud berpijak pada peraturan dan perundangan yang berlaku. Orientasi pembangunan yang baik diarahkan pada pembangunan sosial berkeadilan yang berpusat kepada rakyat dengan menghargai dan mempertimbangkan adanya prakarsa atau partisipasi aktif masyarakat serta kearifan lokal, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Perencanaan merupakan dasar yang penting dan menentukan dalam proses pembangunan, dan pemahaman yang tepat bagi realita sosial dalam pelaksanaan pembangunan sehingga akan membantu para perencana dan pelaku pembangunan untuk merumuskan model fasilitasi yang dapat digunakan untuk mensukseskan tujuan pembangunan tersebut, bahkan sebuah pembangunan dapat diperkirakan tingkat keberhasilan dan kegagalannya dengan melihat kualitas perencanaannya. Memberikan model fasilitasi ini bertujuan untuk lebih menguatkan rasa partisipatif masyarakat mengingat partisipasi merupakan kata kunci agar pembangunan dapat berhasil. Menurut

Arif (2006: 149-150) karena tanpa melibatkan masyarakat, pemerintah tidak akan dapat mencapai secara optimal hasil-hasil pembangunan, sehingga hanya akan melahirkan produk-produk baru yang monumental dan kurang bermanfaat serta tidak sesuai dengan realitas kebutuhan masyarakat. Selaras dengan pernyataan bahwa keterlibatan masyarakat sangatlah penting dalam sebuah pembangunan, dikarenakan keterlibatan masyarakat diperlukan sangat dalam memadukan *model top down* dengan *bottom up* supaya program-program didalam pembangunan dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, dan sekaligus menjadi sarana motivasi untuk masyarakat dalam rangka menumbuhkan rasa ikut bertanggungjawab terhadap hasil-hasil dan pelaksanaan pembangunan (Suryono: 2010: 254). Tetapi sebagai akibat kebiasaan penerapan strategi perencanaan pembangunan yang sentralistik, maka berbagai permasalahan muncul dihadapan masyarakat antara lain pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan hasilnya tidak dapat menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemikiran perencanaan pembangunan dengan pola partisipatif menimbulkan wacana baru bahwa pembangunan tidak akan mampu dilakukan oleh pihak tertentu saja, namun lebih melibatkan semua pihak dalam proses maupun pelaksanaannya. Sejak dikenalnya model seperti ini, istilah *stakeholders*/pemangku kepentingan menjadi sangat meluas yang pada akhirnya dianggap sebagai ide dari model. Kekuatan perencanaan dengan pola partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan ditentukan oleh kuatnya

komitmen serta tanggung jawab dari para *stakeholders*, dan hal tersebut bisa dibuktikan dengan sejauh mana keterlibatan langsung mereka dalam proses perencanaan pembangunan tersebut.

Arti penting partisipasi dapat juga dilihat dari manfaatnya dalam meningkatkan kualitas keputusan yang direncanakan karena didasarkan pada kepentingan dan pengetahuan riil yang ada serta kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan masyarakat. Partisipasi juga bermanfaat dalam membangun komitmen masyarakat untuk membantu penerapan suatu keputusan yang telah dibuat serta menumbuhkan rasa tanggungjawab didalamnya.

Dalam prosesnya partisipasi masyarakat sangat diperlukan, apalagi untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang memberi dampak secara berkelanjutan seperti yang dikemukakan oleh (Tjokroamidjojo: 1995: 22) bahwa pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya itu baru akan berhasil, apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat didalam suatu negara.

Perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif juga merupakan tujuan untuk melibatkan masyarakat secara sosial langsung untuk menampung segala aspirasi yang turut membangun. Hal ini juga memberikan 3 dampak penting bagi perencanaan pembangunan, antara lain menghindarkan dari pola manipulasi, memberikan nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan, dan meningkatkan kesadaran keterampilan politik masyarakat. Perencanaan pembangunan partisipatif ini akan berjalan dengan baik apabila diterapkan

juga 6 prinsip dasar yang diperlukan dalam pelaksanaannya, yang meliputi: kepercayaan, kesetaraan, demokratis, kenyataan berdasarkan pada masalah atau kebutuhan yang terjadi, taat azas dalam berfikir, serta terfokus pada kepentingan warga masyarakat. Perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif masih merupakan paradigma yang harus diterapkan pada masyarakat, mengingat masyarakat selaku sumberdaya pelaku pembangunan di suatu daerah harus tetap diberdayakan dalam menyusun program kegiatan pembangunan tentunya melalui musyawarah mufakat, karena masyarakat yang mengalami dampak langsung dari pembangunan dan lebih mengetahui berbagai persoalan serta potensi yang dihadapi.

Perencanaan pembangunan dengan pola partisipatif masyarakat dilakukan melalui musyawarah pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten/ kota, provinsi sampai tingkat pusat dilaksanakan oleh pemerintah dengan mengambil istilah program Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) yang merupakan forum musyawarah bersama para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam upaya merencanakan program kegiatan pembangunan untuk menjawab segala kebutuhan penting serta permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, ketentraman, ketertiban, maupun pertahanan. Untuk itu upaya-upaya mendorong sinergitas dalam pembangunan terus dilakukan agar pelaksanaannya lebih maksimal, efektif, dan efisien serta terintegrasinya mulai dari tingkat paling bawah sampai pada tingkat pusat. Karena itu proses Musrenbang dalam pelaksanaannya harus berkualitas dan partisipatif

berdasarkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai jalan untuk menentukan hasil dari pembangunan. Pendekatan teknokratis dengan pendekatan partisipasi sejatinya dalam pelaksanaan Musrenbang tidak saling bertentangan. Pendekatan teknokratis berupaya melakukan translasi atas pendekatan partisipasi. Para Pimpinan Daerah atau politisi sering memberikan respons politik atas partisipasi secara cepat, begitu dialog dengan masyarakat berlangsung. Sementara pendekatan teknokrasi membutuhkan proses translasi melalui analisis yang lama, senada dengan lamanya waktu yang dibutuhkan oleh proses partisipatif. Tetapi ada sebuah prinsip dasar bahwa siapapun yang sabar mengikuti proses maka akan membuatnya menjadi lebih bijak. Sehingga jika pendekatan teknokrasi dimasukkan dalam proses partisipasi maka akan menghasilkan perencanaan yang lebih bermakna dan berkualitas. Hal ini misalnya ditempuh dengan analisis masalah dan penentuan skala prioritas dalam setiap tahapan proses penyusunan perencanaan. Sama halnya seperti yang terjadi dalam proses Musrenbang bahwa dalam forum SKPD juga terlihat nuansa formalitas dan politis dalam melakukan proses penyusunan rencana pembangunan. Serta berdasarkan data primer bahwa para delegasi yang berada dalam pemerintahan dibawahnya tergambar lebih mengambil pada posisi yang aman sehingga tidak muncul dinamika kritis. Maka harus dilakukan proses pembaharuan.

Mengingat dalam konteks pembangunan untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti yang dijelaskan oleh Riyadi dan Bratakusumah, (2004: 15-39) bahwa faktor-faktor dari perencanaan pembangunan meliputi: 1) Faktor lingkungan, 2)

Faktor sumberdaya manusia, 3) Faktor pendanaan, 4) Faktor aturan atau kebijakan, 5) Faktor ilmu pengetahuan. Faktor tersebut merupakan unsur penting dalam perumusan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Dalam konteks perencanaan pembangunan, Abe (2002:30) mengemukakan model perencanaan terdiri dari: perencanaan merupakan implementasi atas penjabaran dari perencanaan pusat yang merupakan pengimplementasian perencanaan secara *top down* dimana perencanaan yang sudah tersusun oleh Pemerintah pusat diturunkan kepada pemerintah daerah sebagai acuan perencanaan yang dilakukan secara *bottom up*, yang kedua perencanaan sebagai perumusan kepentingan lokal yang berarti bahwa setiap wilayah perencanaan mempunyai kontur rencana dan kebutuhan berbeda sehingga diperlukan *local resource* sebagai pendukung perencanaan untuk pembangunan kedepan. Selain itu penjabaran dari pusat terdapat dua kemungkinan yang muncul, sebagai penjabaran rencana nasional yang akan diselenggarakan di daerah dan secara kepentingan lokal terdapat kemungkinan karena merupakan perumusan murni dari kepentingan daerah atau lebih, dan merupakan pengisian atas ruang-ruang yang disediakan oleh pusat. Hal ini berawal dari proses desentralisasi dan otonomi daerah dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga titik pembangunan yang dilakukan oleh pusat sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh daerah, namun daerah juga memprioritaskan program-program dan kegiatan apa yang cocok guna masyarakatnya tersebut. Dalam pelaksanaannya tetap dipantau dan diawasi oleh pemerintah pusat sebagai induk dari perencanaan maupun pelaksanaan

pembangunan tersebut tentunya yang bersifat partisipatif dengan melibatkan seluruh pihak.

Pola perencanaan pembangunan melalui tingkat musyawarah ini sebenarnya merupakan pembangunan yang di desain secara sinergis dan terintegrasi yang mampu merealisasikan *bottom-up* planning yang nantinya akan diteruskan melalui *top-down* planning, yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan pelaksanaannya diatur oleh surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pola musyawarah yang memangku kepentingan aspiratif masyarakat dari bawah dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi usulan dalam pembangunan, agar semua permasalahan dapat segera terselesaikan dan terwujudnya pembangunan yang adil dan merata.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan baik dalam tataran konsep maupun implementasinya di masyarakat. Proses Musrenbang yang sudah diprogramkan secara nasional dalam prakteknya terlalu instan, birokratis, elitis, dan terlalu rumit pada tingkatan teknis, musyawarah warga hanya sebatas bersifat formalitas, sehingga forum musyawarah menjadi terkesan asal terselenggara, belum lagi seberapa sempitnya ruang yang memungkinkan keterlibatan publik dalam proses perencanaan pembangunan, melakukan pengawalan maupun kontrol terhadap dokumen otentik yang berisi mengenai konsensus pembangunan yang dicapai (Rohman Ainur dkk: 2012:

2). Seberapa penting usulan yang dikemukakan oleh masyarakat, perbedaan antara kebutuhan dan kepentingan, maupun seberapa besar realisasi dari pelaksanaan pembangunan sehingga nantinya akan juga berdampak pada tingkat partisipatif masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunannya juga dipandang sebagai hal penting dalam masalah perencanaan pembangunan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka peneliti memiliki tujuan untuk mengetahui dan memahami tingkat partisipatif masyarakat dalam mengikuti Musrenbang dan seberapa besar realisasi dari proses Musrenbang tersebut dengan mengambil judul **“PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TINGKAT KECAMATAN”** yang dilaksanakan di tingkat kecamatan, khususnya Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Penelitian ini dilaksanakan karena Kecamatan Kencong memiliki sumberdaya manusia yang beragam dan juga dilihat dari beberapa fenomena yang terjadi di dalam masyarakat yang melibatkan proses partisipasi dengan tingkat yang cukup baik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka dapat diambil rumusan masalah yang akan dikaji dan diharapkan pemecahannya dalam penelitian ini, antara lain:

- a. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?
- b. Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat eksternal maupun internal yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pada dasarnya pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui dan menganalisa tingkat partisipatif masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musrenbang di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
- b. Mengetahui dan Menganalisa faktor yang turut mempengaruhi partisipatif masyarakat dalam proses Musrenbang di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat atau kontribusi, baik secara akademis maupun praktis, yaitu meliputi :

1. Kontribusi akademis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan bahan kajian mengenai pelaksanaan Musrenbang di tingkat Kecamatan sekaligus factor pendukung dan penghambatnya.

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penulis lainnya yang berkaitan dengan Musrenbang dan pelaksanaannya.

2. Kontribusi praktis

a. Memberikan masukan pemikiran dalam kesuksesan pembangunan yang berdasarkan partisipasi masyarakat.

b. Membantu mewujudkan kesadaran akan pentingnya kerja sama (sinergitas) antar *stakeholder* dalam mencapai tujuan.

E. Sistematika Penulisan

Pada penulisan skripsi ini sistematika pembahasan yang digunakan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini menjelaskan tentang pertama, latar belakang yang mengemukakan permasalahan yang berkaitan dengan judul, sehingga menarik untuk diteliti. Kedua, rumusan masalah yang merupakan kajian yang akan dibahas dalam penelitian mengenai bagaimana, apa, dan faktor pendukung maupun penghambat dari pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan. Ketiga, tujuan penelitian yang berisikan hal-hal yang hendak dicapai atau ditemukan nantinya. Keempat, adalah kontribusi penelitian baik secara teoritis maupun praktis sebagai pernyataan hasil bentuk penelitian secara lebih spesifik. Kelima, adalah sistematika pembahasan yang merupakan uraian singkat dari bab-bab penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan adalah teori perencanaan, teori pembangunan, teori partisipasi, dan Musrenbang itu sendiri. Teori yang digunakan merupakan kutipan pendapat dari berbagai ahli baik dari dalam maupun luar negeri.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi langkah-langkah teknis dan praktis sehingga tujuan penelitian diperoleh yang terdiri dari jenis penelitian, Lokasi Penelitian di Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara garis besar isi dari hasil penelitian dan pembahasan adalah mengulas tentang analisis data penelitian, interpretasi hasil analisis data penelitian dan pengujian hipotesis penelitian.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran hasil penelitian diuraikan secara garis besar merupakan temuan pokok yang menjawab tujuan penelitian. Sedangkan saran merupakan rekomendasi terhadap studi lanjutan dan kebijakan-kebijakan yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Perencanaan

1. Pengertian Perencanaan

Perencanaan adalah proses yang dimulai dengan awalan perencanaan itu sendiri disusul pelaksanaan, dan diakhiri pengendalian. Perencanaan merupakan kegiatan dari pembangunan yang paling prioritas karena merupakan pemetaan dari langkah lanjutan dan tujuan yang ingin dicapai, karena perencanaan menentukan arah prioritas dan strategi pembangunan. Pengertian perencanaan adalah bentuk pendefinisian masalah ke dalam cara-cara yang dapat diterima untuk melakukan tindakan atau mengintervensi suatu kebijakan (Friedmann, 1987). Penyerapan substansi metode dari disiplin ilmu lain sering disebut sebagai *substantive theory* atau dalam teori perencanaan dikenal dengan *theory in planning*, sementara teori perencanaan disebut sebagai teori prosedural atau *theory of planning*. Peranan teori perencanaan prosedural seharusnya memiliki porsi yang lebih besar dalam menjalankan fungsinya, sementara keberadaan teori substantif diharapkan sebagai pendukung atau *inferior* dari keberadaan teori perencanaan prosedural. Pada prakteknya justru teori substantif yang memiliki sumbangan lebih besar melalui metoda-metoda analisis yang diserap oleh teori perencanaan prosedural.

Definisi perencanaan menurut N. Rode and De Smit (dalam Syafrudin, 1993:3):

Perencanaan adalah suatu proses integral dalam mempersiapkan dan merumuskan pengambilan keputusan-keputusan di kemudian hari. Perencanaan mencakup perumusan tujuan-tujuan tertentu serta mencakup langkah-langkah yang harus diambil berdasarkan musyawarah dengan pihak pimpinan yang bersangkutan. Perencanaan adalah memberi bentuk kepada situasi (yang akan datang), untuk mencapai hal tersebut harus dirincikan secara jelas keinginan-keinginan yang ada serta harus ditetapkan sasaran-sasaran yang dikehendaki, jadi dengan demikian harus dirumuskan problem-problem yang bersangkutan dengan hal itu. Perencanaan juga berarti penataan kembali rencana, pengendalian tambahan atas tindakan-tindakan pelaksanaan berdasarkan evaluasi (secara berkesinambungan) tersebut diatas, serta melakukan pengendalian tambahan terhadap cara menyusun rancangan-rancangan tersebut. Jadi perencanaan itu merupakan suatu proses yang bersifat adaptif.”

Sedangkan arti sebuah perencanaan menurut Faludi (dalam Syafrudin, 1993:5) “merumuskan program-program untuk bertindak.” Dalam sebuah perencanaan dalam merumuskannya terdapat beberapa ciri-ciri konsep yang digunakan untuk merumuskan masa depan, Faludi(1975) (dalam Syafrudin, 1993:13) telah menyusun sebuah kerangka klasifikasi yang membedakan tiga dimensi dalam tipologi perencanaan, yang masing-masingnya diberi penamaan menurut nilai-nilai ekstrem dimensi yang bersangkutan, yaitu :

“- perencanaan cetak biru berhadapan dengan perencanaan proses: Sampai seberapa jauhkah bisa dilahirkan suatu perencanaan sebagai hasil dari pendekatan secara ketat yang berasal dari tradisi teknologis.

- Perencanaan beruanglingkup rasional berhadapan dengan perencanaan secara terurai-inkrementalis (meningkat): Sampai seberapa jauhkah suatu perencanaan bisa bersifat mirip dengan ideal yang rasional.
- Perencanaan normative berhadapan dengan perencanaan fungsional: Apakah sasarannya sudah bersifat pasti/tak berubah sehingga hanya bisa dilakukan pilihan mengenai perlatannya, ataukah sasarannya juga bisa dipilih-pilih.

2. Ciri- ciri Konsep Perencanaan:

Menurut Vught (1982) (dalam Syafrudin: 1993: 8-12), ada beberapa ciri konsep dalam perencanaan diantaranya:

a. Perencanaan secara proses, yang merupakan sebuah konsepsi mengenai perencanaan dimana kita beranjak dari berlangsungnya kegiatan perencanaan secara kesinambungan. Dengan ditandai kondisi-kondisi yang berubah ubah secara terus menerus. Pada tingkat ini tidak dirumuskan suatu keadaan akhir yang pasti atau jelas dan tidak ada usaha untuk melaksanakan suatu manipulasi yang maksimal, tugas intinya untuk terus-menerus memantau keadaan lingkungan yang mengalami perubahan secara cepat.

b. Perencanaan beruang lingkup-rasional adalah sebuah konsepsi, dimana sebuah usaha untuk mencakup setiap rincian penting yang mungkin ada, baik dalam proses penguasaannya. Berdasarkan konsepsi ini kita harus kita harus berusaha menggali dan

mengetahui sebanyak-banyaknya sehingga bisa mengendalikan sebanyak-banyaknya. Pembeneran terhadap usaha ini adalah terdapatnya keyakinan, bahwa berdasarkan sebuah proses pembentukan consensus maka akan timbul kemungkinan untuk merumuskan suatu 'kepentingan umum'.

c. Perencanaan secara meningkat (*incremental*), dapat dianggap sebagai serangan terhadap model dalam pembentukan keputusan yang didasari sikap rasional, hal ini menurut pendapat kaum inkrementalis adalah citra ideal intelektual yang tidak rasional. Mengacu pada pendirian kaum incremental, kita harus sudah puas terhadap perubahan yang kecil saja dalam suatu keadaan yang sekarang; kita tidak harus perlu memburu keadaan yang bersifat lengkap; kita hanya perlu memburu suatu keadaan yang bersifat lengkap; hanya perlu pengembangan beberapa alternatif kebijaksanaan yang hanya sedikit saja menyimpang dari hal-hal yang sedang berlaku, serta mengembangkan suatu ikhtisar yang bersifat terbatas mengenai akibat-akibat yang akan timbul dari penerapan-penerapan alternatif tersebut. Beberapa tujuan dianggap hal yang selalu mengalami perubahan, sedangkan tindakan pelaksanaan perencanaan bersifat kontinyu secara potensial. Kita menyadari adanya kekurangan yang tetap mengenai informasi dan mengenai ketidakpastian yang besar-besar.

d. Perencanaan transaktif, merupakan perencanaan yang ditandai oleh kenyataan bahwa proses perencanaan memperoleh bentuknya karena terjadi kontak interaksi langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Dialog yang berlaku antar manusia memainkan peranan besar dalam proses-proses saling belajar, yaitu justru merupakan landasan bagi perkembangan proses-proses perencanaan. Lembaga-lembaga perencanaan bersifat didesentralisasikan sehubungan dengan itu memang diharapkan memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Perencanaan bukanlah sebuah proses yang bisa dipindahkan dari proses-proses aksi-aksi sosial yang normal perencanaan justru lahir dikarenakan adanya komunikasi tersebut. Inti fokusnya diarahkan kepada masalah pengaruh masalah perencanaan terhadap perilaku manusiawi, terhadap nilai-nilai manusiawi serta terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya kerjasama tersebut.

e. Perencanaan strategis merupakan perencanaan dengan mencari berbagai cara yang mungkin bisa memenuhi dan mewujudkan tujuan-tujuan umum tersebut.

3. Tahapan dalam perencanaan:

Dalam sebuah proses perencanaan ada beberapa tahapan menurut Dr. Ir. Van Dusseldorp (Sjafrudin:1973:27), tahapan yang pertama yaitu rumusan masalah, dilanjut dengan pengumpulan dan

pemeriksaan bahan, penyusunan rencana, penetapan rencana, dan tahapan terakhir adalah melaksanakan dan menilai hasilnya. Dalam tahap- tahap tersebut kecuali sebagian dari tugas untuk merumuskan sasaran-sasaran seperti pembuatan perencanaan dan sebagian penilaian, dimasukkan kedalam proses perencanaan. Kemudian pembuatan rencana dapat dibagi dalam 7 bagian (Sjafrudin:1973: 28):

- a. Perencanaan harus dimulai dengan melakukan analisa terhadap situasi yang sedang terjadi dan mengukur terhadap sasaran-sasaran yang harus dicapai kedepannya.
- b. Selanjutnya yaitu menentukan program aksi yang mana akhirnya dapat dilaksanakan pada situasi yang sedang terjadi untuk mencapai sasaran tersebut. Ditetapkan dalam tahap yang terdahulu disarankan untuk membuat alternatif program bagi rencana-rencana yang terbentuk.
- c. Langkah selanjutnya yaitu penentuan waktu dan metode yang dibutuhkan untuk pelaksanaan dari tiap-tiap program.
- d. Berbagai program aksi lebih dianjurkan ditinjau dai latarbelakang dan situasi yang sedang terjadi. Sekaligus memperhitungkan alat-alat yang tersedia dan periode yang diperlukan untuk pelaksanaannya.
- e. Pemeliharaan haruslah dibuat diantara program-program yang optimal dan praktis.
- f. Dalam keadaan-keadaan umumnya sejumlah program aksi yang diwujudkan bersama-sama dalam sebuah rencana, haruslah diintegrasikan.

- g. Hasil dari kegiatan-kegiatan yang telah terhubung oleh bagian terdahulu harus diuraikan secara jelas dalam laporan yang mencakup pula tujuan analisa singkat mengenai situasi yang terjadi sekarang serta program pelaksanaan yang tepat.

Koordinasi dalam perencanaan, ada beberapa prinsip dalam koordinasi ini tentunya dalam sebuah perencanaan sangatlah penting untuk melakukan koordinasi dengan tingkat pusat maupun tingkat regional, prinsip-prinsip tersebut antara lain (Sjafrudin:1973:44):

- a. Pemerintah pusat harus menetapkan petunjuk-petunjuk tentunya melalui peraturan sebagai prosedur-prosedur dalam tahapan perencanaan.
- b. Pembentukan panitia-panitia gabungan local maupun regional dengan wakil-wakil lokal, regional dan pemerintah pusat dan dengan staf teknis.
- c. Pembentukan panitia-panitia kerja untuk menjamin terbentuknya pengertian antar ahli, seperti ahli politik, ahli teknik, dan khalayak ramai untuk menimbulkan dan melatih suasana “*team spirit*”.
- d. Penggunaan media penghubung masyarakat sangat ditekankan pada setiap tahap perencanaan.

B. Teori Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Secara ensiklopedik, kata pembangunan telah menjadi bahasa dan konsep dunia. Konsep tersebut dianalogkan dengan konsep: pertumbuhan (*growth*),

rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), westernisasi (*westernization*), perubahan social, pembebasan, pembaharuan, pembangunan sebuah bangsa, pembangunan nasional, pengembangan, dan juga pembinaan. Secara definitif yang dimaksud dengan teori-teori pembangunan mengacu pada dunia ketiga sebagai dunia yang berkembang, merupakan teori- teori pembangunan yang berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh negara-negara miskin dan terbelakang atau sedang berkembang, dalam sebuah dunia yang didominasi oleh kekuatan ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kekuatan militer negara-negara adi kuasa (*super power*) atau negara-negara industri maju.

Teori pembangunan sebagai program studi secara umum bertujuan untuk, menganalisis kelayakan teori-teori pembangunan yang berkembang selama ini dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat kontemporer (*theoretical adequacy*), membandingkan antara teori dengan kenyataan fakta dilapangan (*empirical validity*), menganalisa konsistensi dan relevansi teori dengan kebijakan (*policy effectiveness*), menjelaskan dan membuktikan seberapa kuat intensitas pengaruh teori terhadap metodologi penelitian , sebagai landasan kritik teori dan debat teori.

Dalam teoripembangunan pengaruh lingkungan terhadap pemberlakuan dan pemberdayaan dapat dianalisis melalui dua dimensi pokok, yaitu kompleksitas lingkungan dan stabilitas lingkungan. Kedua dimensi tersebut menentukan besarnya ketidakpastian lingkungan yang harus dihadapi oleh

keberlakuan teori dan isu. Ketidakpastian lingkungan menunjukkan dimana masyarakat tidak mempunyai informasi yang cukup

Sebuah masalah pokok dalam penyusunan strategi pembangunan nasional pada prinsipnya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu nasional dan global. Pendekatan seperti ini diambil, karena permasalahan lokal/daerah lebih diserahkan kepada daerah, dimana masalah masalah di tingkat nasional digunakan rujukan pada tingkat daerah. Pembangunan sebenarnya lebih mudah jika kita dapat menemukan prinsip pokoknya, prinsip pokok pembangunan lebih mengacu pada kondisi dari rakyat yang hendak atau sedang dibangun. Kenyataan pertama bahwa yang harus dipegang adalah pembangunan yang kita selenggarakan hari ini tidaklah hadir didalam ruang kosong. Tugas pembangunan bahkan berhadapan dengan kekronisan akibat lanjut dari krisis ekonomi, dengan inti permasalahan adalah lebarnya dan dalamnya antar mereka yang berhasil dalam pembangunan dan yang gagal dalam pembangunan. Berdasarkan pemahaman ini, maka tugas pembangunan ada dua:

Memihaki yang lemah, agar menjadi kuat dan mandiri, dan

Menjaga yang kuat, agar tidak jatuh menjadi lemah, bahkan kalau bisa menjadi mitra pemerintah untuk mengangkat yang lemah (Riant Nugroho D, hal:23)

Pembangunan selalu dan harus selalu dari, oleh, dan untuk manusia.

Pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Amartya Sen, adalah untuk membebaskan manusia kepada kemanusiannya; agar ia memperoleh haknya untuk memilih dari berbagai pilihan kehidupan yang terbaik bagi diri dan

lingkungannya. Pembangunan selama ini hanya berorientasi pada angka, paradigma, teori, mesin, uang dan kekuasaan. Begitu dahsyatnya gelombang ini sehingga kita alpa bahwa pembangunan itu adalah untuk manusia; untuk kemanusiaan. Pembangunan hanya dapat berhasil dan dipertahankan jika dilakukan bersama-sama. Namun pembangunan tidak efektif jika tidak diselenggarakan melalui mekanisme musyawarah dan mufakat. Kita mahfum bahwa bangsa yang beragam, untuk bisa bergerak bersama saling mendukung maka kita harus saling bicara, musyawarah untuk bermufakat. Kesalahan terdahulu pembangunan dilaksanakan dengan cara mufakat dulu baru musyawarah. Sehingga menimbulkan kesan pemaksaan, penyeragaman, pemanipulasian.

Konsep utuh dari pembangunan pada hakikatnya bermuara pada trilogi: Pembangunan nasional adalah berpola dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Peran pemerintah adalah menjaga agar proses pembangunan dengan pola tersebut dapat berjalan dengan baik dan alami. Pembangunan nasional berbasiskan partisipasi dan pemberdayaan. Partisipasi adalah kunci dari keberhasilan yang berkesinambungan, sebab pihak yang berhasil mencapai keberhasilan dari usahanya sendiri. Pemberdayaan sendiri merupakan sebuah awal proses untuk menjadikan mereka yang belum mampu berpartisipasi dalam pembangunan untuk mampu berpartisipasi. Pemberdayaan diawali dari pemampuan (*enabling*). Pemberdayaan dalam pembangunan adalah konsep pemihakan kepada mereka yang tertinggal dan dilakukan secara aktif oleh pemerintah dan mereka yang lebih maju (intervensi).

Pembangunan pada dasarnya adalah kegiatan yang kolosal, memakan waktu yang panjang. Secara umum proses ini dimulai dari perencanaan, disusul pelaksanaan, dan diakhiri dengan pengendalian. Berbagai teori pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi, muncul untuk menjawab masalah ini (lingkaran kemiskinan) yang kesemuanya fokus kepada upaya mendorong investasi, misalnya teori Henry C. Brutton yang menganjurkan pemerintah di negara berkembang untuk meningkatkan tabungan melalui dorongan modal, rangsangan langsung, kesempatan investasi, dan mengenalkan lembaga keuangan.

2. Prinsip Pembangunan

Pada era modern ini pembangunan lebih dipandang sebagai aspek historis dan politis, dikatakan begini karena (Riant Nugroho: xvii) pembangunan dipahami sebagai paham daripada sebuah proses manajerial yang tentunya melibatkan optimalisasi pemanfaatan aset-aset atau sumber-sumber daya yang tersedia. Memang pembangunan jika ditelaah lebih lanjut lebih kepada praktek politik daripada praktek manajemen. Perbedaan pokok pemahaman dalam perspektif politik maupun manajemen merupakan alternatif pendekatan baru dalam memahami pembangunan. Kegagalan dalam membangun bangsa bukan karena gagal dalam membangun, namun karena gagal mempertahankan kesinambungan keberhasilan pembangunan. Kegagalan tersebut dikarenakan pada keterlihatan pembangunan sebagai politik, sebagai *struggle power*. Terdapat dua konsekuensi dari perspektif ini, yang pertama adalah pemegang kekuasaan

yang akan berusaha bertahan selama mungkin demi mempertahankan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan dalam politik Machiavelli. Sedangkan yang kedua mereka menggantikan sebagai penguasa baru akan menumbang rubuhkan bangunan yang sudah diciptakan penguasa sebelumnya, sebaik apapun pembangunan yang sudah dicapai. Ada beberapa prinsip pokok yang dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pembangunan (Riant Nugroho: 2003: xx-xxi):

- a. Prinsip kerjasama tim, kerjasama harus ada dua tingkat. Pertama tingkat administrasi publik, yaitu melibatkan eksekutif dan legislatif serta para perangkat pendukung daerah. Kedua pada tingkat kebangsaan dalam bentuk kerjasama antara negara dan juga masyarakat baik pada tingkat nasional maupun local.
- b. Prinsip pengkreasian nilai, bahwa hasil akhir dari proses kerjasama tim adalah kemanfaatan secara optimal bagi rakyat.
- c. Prinsip kesinambungan, bahwa pemegang kekuasaan baru, tugas utamanya bukan membongkar kembali eksistensi pembangunan yang sudah berjalan, namun melanjutkan minimal mengkapitalisasi aset produktif dari pembangunan yang telah berjalan lebih dahulu.
- d. Konsistensi dar jalannya pembangunan yang dimulai dengan visi dan misi, dilanjutkan strategi, kemudian implementasi, da ditutup dengan pengendalian atau kontrol dibarengu dengan semangat reinvensi di setiap momen pembangunan. Konsistensi ini tidak

identik dengan kekakuan, nemaun dengan penerapan disiplin. Salah satu bentuk disiplin yang diperlukan dalam mempertahankan pembangunan adalah disiplin inovasi (*discipline of innovation*).

- e. Berdasarkan prinsip negara (pemerintah) kuat dan masyarakat kuat, pada era globalisasi ini seperti dikatakan oleh Michael E. Porter dalam *Competitive advantage Among Nations* (1998), peran pemerintah/negara (termasuk pemerintah daerah) tidaklah semakin kecil, justru harus semakin kuat dan penting. Penguatan disini tentu saja tidak mengarah kepada “*strong and weak society*” (sebuah konsep yang sangat politis, *a zero sum game model*), melainkan kepada “*strong state and weak society*” (sebuah konsep manajemen, *a win win model*). Sebuah pemerintah yang hanya berperan sebagai fasilitas semata, seperti nasihat Gaebler & Osborne dalam *Reinventing Government* (1992) yang dilanjutkan oleh Gaebler & Plastrik dalam *Banishing Bureucracy* (1996), adalah mitos. Mitos yang terpatahkan antara lain oleh Gerald Caiden dala *Administrative Reform Comes Age* (1992) dan guru manajemen Henry Mintzberg, *Managing Government, Governing Management* (1996).

3. Paradigma Pembangunan

Pembangunan menurut Siagian (1974) sebagai suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Oleh karena itu, Ponsioen (1968) berpendapat bahwa pembangunan bangsa adalah bagian integral dari pembangunan nasional suatu negara. Pembangunan setiap bangsa negara berkembang bersifat multidimensional, berupa pembangunan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional seperti politik, ekonomi dan sosial budaya. Bryant dan White (1982) menyebutkan bahwa pembangunan adalah upaya manusia untuk mempengaruhi masa depannya dengan lima implikasi utama, yaitu: (1) pembangunan berarti membangkitkan kemampuan manusia secara optimal, baik individu maupun kelompok (*capacity*). (2) pembangunan berarti mendorong tumbuhnya kebersamaan, pemerataan nilai dan kesejahteraan (*equity*). (3) pembangunan berarti menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai kemampuannya (*empowerment*). (4) pembangunan berarti membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri (*sustainability*). (5) pembangunan berarti mengurangi ketergantungan negara satu terhadap negara lainnya (*interdependence*). Pembangunan diatas harus berorientasi pada *people centered development* (pembangunan yang berpusat pada rakyat).

Dalam hal tersebut Korten (1984) menjelaskan bahwa asumsi dasar pembangunan yang berpusat pada rakyat itu menginginkan adanya alternatif paradigma pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada produksi dan kebutuhan dasar, tetapi juga terhadap peningkatan potensi manusia. Karenanya dalam pembangunan bahwa setiap manusia memiliki potensi dan aya untk mengembangkan kemampuan dirinya menjadi lebih baik. Dengan kata lain, bahwa pembangunan merupakan sebuah proses perubahan dari suatu ang kurang berarti menjadi sesuatu yang lebih berarti (*development signifies change from something though to be less desirable to something thought to more desirable*).

C. Teori Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Secara harfiah partisipasi dapat diartikan dari bahasa latin *participare* yang mempunyai arti dalam bahasa Indonesia mengambil bagian atau keputusan. Partisipasi merupakan keterlibatan setiap warga negara yang berhak suara dalam hal pembuatan keputusan, baik itu secara langsung, maupun dengan cara intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi masyarakat juga mengharuskan kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam pembangunan, hal ini keyakinan bahwa masyarakat yang paling tahu apa yang mereka butuhkan dan masyarakatlah yang paling tahu permasalahan apa yang mereka hadapi (Juliantara.D,Eko dan Hilal: 2004: 84)

Definisi atau pendapat pokok mengenai partisipasi menurut Keith Davis (dalam Sastropetro Santoso: 1986: 51):

“partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya gotong-royong merupakan modal utama. Swadaya adalah kemampuan masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar pemenuhan kebutuhan”.

Sedangkan menurut Gordon Allport (dalam Sastropetro Santoso: 1986: 51) definisi partisipasi adalah keterlibatan ego atau diri sendiri/pribadi/personalitas (kejiwaan) lebih dari pada hanya jasmaniah/fisik saja.

Pengertian partisipasi sesuai dengan pandangan Sjahrir (Muluk.Mr: 2007: 51):

“pengertian partisipasi dalam pembangunan bukanlah semata-mata partisipasi dalam pelaksanaan program, rencana, dan kebijakan pembangunan, tetapi juga partisipasi yang emansipatif. Artinya sedapat mungkin penentuan alokasi sumber-sumber ekonomi semakin mengacu pada motto pembangunan dari, oleh, dan untuk rakyat”.

Partisipasi mengalami pengembangan dalam proses pembangunan sehingga memiliki beberapa maksud, pertama bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri sehingga dengan demikian akan memudahkan rakyat menghadapi situasi-situasi sulit, serta mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang bersifat negatif. Kedua, partisipasi bukan hanya menjadi cermin kongkrit dalam peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting adalah bahwa partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan rakyat. Ketiga, dalam menghadapi persoalan-persoalan

pembangunan akan lebih mudah diatasi dengan adanya partisipasi rakyat, sehingga rakyat tidak dimaknai sebagai sumber ketidaktahuan melainkan subyek pembangunan yang memiliki kemampuan dan harus diberdayakan. Keempat, keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan adanya sikap saling terbuka antar keduanya tentu saja akan menjadi basis bagi suatu kepercayaan dalam segi sosial politik.

Partisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat mengembangkan kemandirian yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat daerah demi akselerasi pembangunan. Selain itu konsep partisipasi tidak hanya mencakup pada proses perencanaan dan pelaksanaan lagi tetapi juga partisipasi dalam penerimaan manfaat (Muluk.MR: 2007: 47). Bryant dan White (dalam Muluk.MR: 2007: 47):

“mengingatkan pula agar konsep partisipasi tidak dipersempit hanya pada aspek penerimaan manfaat belaka karena akan mengubah pengertian umum berpartisipasi. Aspek penerimaan manfaat merupakan pelengkap dari cakupan pada proses perencanaan dan pelaksanaan sehingga membawa manfaat yang lebih besar bagi masyarakat”.

2. Partisipasi dalam Perspektif Administrasi Publik

Dalam kaidahnya kajian dan praktik dalam administrasi publik pada berbagai negara terus mengalami perkembangan, perubahan ini ditengarai oleh kompleksitas permasalahan yang dihadapi dalam administrasi publik. Hal ini ditanggapi melalui perkembangan teoretis dalam ilmu administrasi publik. Tidak ubahnya dengan partisipasi sebagai dasar dan menjadi perhatian penting dalam administrasi public yang berlandaskan

sikap demokratis (Muluk:2007: 28). Osborne dan Gaebler mengemukakan dua prinsip partisipasi masyarakat dalam administrasi publik (Muluk:2007:29):

“Pertama *prinsip* ‘community owned government: empowering rather than serving’ yang menunjukkan betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam administrasi publik. Kedua, prinsip ‘decentralized government: from hierarchy to participation and teamwork’ yang menunjukkan betapa pentingnya manajemen partisipatif yang memungkinkan partisipasi karyawan dalam penyelenggaraan administrasi publik.

3. Tingkatan Partisipasi Masyarakat

Pertumbuhan kegiatan berpartisipasi memerlukan sebuah keterampilan dan pengetahuan sebagai upaya tercapainya berbagai tingkatan, dengan memperhatikan perbedaan tingkatan yang ada, maka dasarnya ada tiga tingkatan dalam berpartisipasi, yaitu (Sastropetro Santoso: 1986: 47-49):

- a. Tingkat saling mengerti, dengan tujuan untuk membantu para anggota kelompok agar memahami sikap maupun fungsi masing-masing, sehingga dapat mengembangkan kerjasama kearah yang lebih baik. Sehingga secara individu mereka akan lebih banyak dilibatkan, menunjukkan sikap kreatif, dan merasa lebih bertanggung jawab.
- b. Tingkat kepenasihan/sugesti, yang dibangun dengan dasar saling mengerti, dikarenakan anggota kelompok pada hakekatnya sudah cenderung siap untuk memberikan suatu usul/saran kalau kalau telah memahami masalah dan ataupun

situasi yang dihadapkan kepada mereka. Pada partisipasi bentuk penasihatan ini seseorang dapat menuangkan sikap kreatif untuk membantu mengambil keputusan dan memberikan saran, namun dibatasi dengan tidak dapat menentukan sebuah keputusan. Oleh karena itu, sebagai pemimpin harus sedia menentukan para pesertanya. Keputusan teknis banyak yang dilakukan atas dasar kompetensi teknik, jika seorang pemimpin mengesahkan keputusan atau kebijakan-kebijakan tersebut. Cara tersebut dapat meningkatkan inisiatif, kreativitas, disiplin dan juga semangat selain mengurangi sesuatu yang bersifat kaku maupun mengurangi pengarahan/petunjuk dari atasan. Seorang pemimpin dalam menerapkan dan melaksanakan proses partisipasi sangat perlu menumbuhkan pengertian dan kesadaran masyarakat atau anggota kelompok.

- c. Tingkat otoritas, merupakan pemberian kepada kelompok suatu wewenang untuk memantapkan keputusannya. Kewenangan tersebut dapat bersifat resmi kalau kelompok hanya memberikan kepada seorang pemimpin konsep keputusan yang akan diambil sehingga kemudian dapat diresmikan menjadi keputusan oleh seorang pemimpin.

Teori yang terkenal untuk menunjukkan kadar partisipasi dikemukakan oleh Sherry R Arnstein (1969) (Suryono: 2010: 259) sebagai *ladder of*

participation (tangga partisipasi). Teori ini mengklasifikasikan partisipasi sebagai kekuasaan masyarakat dalam melakukan pengaruh perubahan dalam pembuatan kebijakan. Dalam teori ini terdapat tiga derajat partisipasi yang kemudian diperinci lagi kedalam delapan anak tangga partisipasi. Derajat paling rendah merupakan nonpartisipasi atau sebenarnya merupakan distorsi partisipasi.

Tabel. 1. Model Delapan Anak Tangga Partisipasi Masyarakat

TANGGA KE	BENTUK PARTISIPASI	KATEGORI
VIII	Pengawasan Masyarakat	Tingkatan partisipasi sebagai kekuatan masyarakat (<i>Degrees of Citizen Power</i>)
VII	Pendelegasian Kekuasaan dan Kewenangan	
VI	Kemitraan/ Kesetaraan	
V	Perdamaian/ Kompromi	Tingkatan partisipasi yang bersifat semu atau pseudo (<i>Tokenisme</i>)
IV	Berkonsultasi	
III	Memberi Informasi	

II	Therapy (diagnosa untuk pengobatan dan penyembuhan)	Tingkatan bukan partisipasi
I	Memaniplulasi (Rekayasa)	

Sumber: Sherry R Arnstein (1969)

Derajat pertama atau derajat terendah merupakan distorsi partisipasi, dengan tujuan sebenarnya merupakan bukan untuk mendukung rakyat berpartisipasi dalam pembuatan perencanaan dan pelaksanaan suatu program, tetapi untuk memungkinkan penguasa mendidik dan menyenangkan partisipasi. Derajat kedua merupakan derajat yang menunjukkan adanya partisipasi (*tokenism*). Keterlibatan masyarakat lebih tinggi pada derajat ini. Derajat ini telah melibatkan aktifitas dialog dengan publik yang berarti warga memiliki hak untuk didengar pendapatnya meskipun tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Derajat tertinggi merupakan kendali masyarakat yang lebih memberikan peluang dalam pembuatan kebijakan. (Muluk :2007 ;58-59)

Tabel 2. Program Pembangunan: Pemberdayaan Versus Ketergantungan

ASPEK PROGRAM PEMBANGUNAN	PEMBERDAYAAN	KETERGANTUNGAN
Inisiatif	Di desa/ kampung	Pemilik modal di perkotaan

Awal kegiatan	Sebagai tindakan untuk memecahkan masalah	Sebagai perencanaan formal
Proses rancangan program	Menjalin kerjasama	Dikuasai oleh tenaga ahli yang bersifat statis
Teknologi	Ilmu murni	Ilmu terapan
Dasar sumber utama	Masyarakat lokal dengan sumber-sumbernya	Tenaga teknis dan dana pusat
Kesalahan/ error	Merangkul dan melibatkan	Ketidaktahuan dan memendam
Dukungan organisasi	Membangun dari bawah (built from bottom up)	Memangun dari atas (built from top down)
Pertumbuhan	Bertahap dan organis	Cepat dan mekanis
Pengembangan staf	Rutin, berdasar kebutuhan lapangan dan belajar melakukan suatu kegiatan	Memelihara, diatur dibelakang meja, bersifat mendidik
Bentuk organisasi	Tim gabungan/ terpadu	Teknisi spesialis
Evaluasi	Bersifat pribadi, rutin dan berorientasi pada proses	Diluar pribadi kadang kala beroientasi pada hasil

Kepemimpinan kuat	Kuat, berkelanjutan, dan bersifat perorangan	Terbatas, sering berubah, dan bersifat posisional
Analisis sosial	Mendefinisikan masalah dan menciptakan program	Menegaskan rencana dengan mempertemukan evaluasi persyaratannya
Fokus manajemen	Sistem kinerja yang berkelanjutan pada perangkat kelembagaanya	Mempersiapkan kelengkapan proyek

Sumber: Sjafrudin, Ateng (1973)

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Arnstein, Tjokroamidjojo (dalam Arif Saifudin: 2012: 49) membagi sebuah partisipasi kedalam tiga tahapan, yaitu:

1. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah.
2. Keterlibatan dalam memikul beban maupun tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Keterlibatan dalam memetik dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

4. Perencanaan Partisipatif

Partisipasi merupakan merupakan hal yang penting di dalam perencanaan, tidak ada program dalam pembangunan yang dijalankan tanpa adanya proses partisipasi dalam perencanaan. Partisipasi sebagai faktor penting dalam menghasilkan perencanaan pembangunan yang

berpihak terhadap masyarakat banyak. Studi yang dilakukan Uma Lele (Muluk:2007:47-48) menunjukkan bahwa dalam partisipasi pada perencanaan dan pelaksanaan program dapat mengembangkan kemandirian yang dibutuhkan oleh anggota masyarakat daerah demi akselerasi pembangunan. Selain itu, partisipasi secara konsep diperluas tidak hanya mencakup proses perencanaan dan pelaksanaan lagi tetapi juga partisipasi dalam menerima manfaat. Grasberg & Gunner menambahkan aspek lainnya, yakni evaluasi yang mengartikan partisipasi sebagai sebuah mekanisme yang melibatkan masyarakat di dalam suatu program yang dimulai dari tahap identifikasi sampai implementasi dan evaluasi, dan dengan demikian konsep partisipasi menjadi lebih luas mulai dari aspek perencanaan, implementasi, evaluasi, sampai penerimaan manfaat.

Perencanaan partisipasi dalam masyarakat mencakup peran serta dalam segala proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, dimulai dari proses perencanaan itu sendiri, pelaksanaan, evaluasi dan penerimaan manfaat pembangunan dengan mempertimbangkan otonomi yang ada dalam kemandirian masyarakat. Dalam sebuah perencanaan yang partisipatif juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat (Sastropetro: 1986 ;22):

- a. Pendidikan, kemampuan membaca dan menulis, kemiskinan, kedudukan sosial dan percaya diri sendiri.
- b. Kecenderungan untuk menyalah artikan motivasi, tujuan, dan kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada

timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk.

- c. Kurangnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai program pembangunan.

Peran pemerintah dalam perencanaan partisipatif itu sendiri sesuai dengan tujuan, prinsip, dan syarat secara umum yang digambarkan dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 mengenai Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), adalah:

- a. Mendorong pelibatan para pemangku kepentingan dalam pengambilan proses perencanaan.
- b. Mengidentifikasi dan membahas isu-isu dan permasalahan pembangunan dan pencapaian kesepakatan prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.
- c. Optimalisasi pemanfaatan dan dana yang tersedia terhadap kebutuhan pembangunan.
- d. Memfasilitasi pertukaran (*sharing*) informasi, pengembangan konsensus dan kesepakatan atas penanganan masalah pembangunan daerah.
- e. Menyepakati mekanisme untuk mengembangkan kerangka kelembagaan, menguatkan proses, menggalang sumber daya

yang diperlukan untuk mengatasi isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.

- f. Menggalang dukungan dan komitmen politik dan sosial untuk penanganan isu dan permasalahan prioritas pembangunan daerah.

Fungsi Musrenbang ini juga sebagai proses silaturahmi antar masyarakat, antara masyarakat dengan pemerintah, dan antara masyarakat dengan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan. Hasil yang akan dicapai dalam Musrenbang ini adalah ketetapan prioritas pembangunan disetiap tingkatan wilayah pembangunan sertapengklasifikasian kegiatan pembangunan sesuai dengan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, maka musrenbang perlu memiliki karakter/prinsip sebagai berikut:

- a. Merupakan '*demand driven process*' artinya aspirasi dan kebutuhan peserta musrenbang berperan besar dalam menentukan keluaran hasil Musrenbang.
- b. Bersifat inklusif, artinya musrenbang melibatkan dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua *stakeholders* untuk menyampaikan masalahnya, mengidentifikasi posisinya, mengemukakan pandangannya, menentukan peranan dan kontribusinya dalam pencapaian hasil Musrenbang.

- c. Merupakan proses berkelanjutan artinya merupakan bagian integral dari proses penyusunan rencana daerah.
- d. Bersifat *'strategic thinking process'* artinya proses pembahasan dalam musrenbang distrukturkan, dipandu, dan difasilitasi mengikuti alur pemikiran strategis untuk menghasilkan keluaran nyata; menstimulasi diskusi yang bebas dan fokus, dimana solusi terhadap permasalahan dihasilkan dari proses diskusi dan negosiasi.
- e. Bersifat partisipatif dimana hasil merupakan kesepakatan kolektif peserta musrenbang.
- f. Mengutamakan kerjasama dan menguatkan pemahaman atas isu dan permasalahan pembangunan daerah dan mengembangkan konsensus.
- g. Bersifat resolusi konflik artinya mendorong pemahaman lebih baik dari peserta tentang perspektif dan toleransi atas kepentingan yang berbeda; memfasilitasi landasan bersama dan mengembangkan kemauan untuk menemukan solusi permasalahan yang menguntungkan semua pihak (*mutually acceptable solutions*).

Sebagai bagian penting dari proses perencanaan partisipatif, keberhasilan musrenbang sangat ditentukan oleh pelaku, materi, dan proses yang terkait Musrenbang itu sendiri. Secara lebih terinci faktor-faktor Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) menurut

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-187/Kep/Bangda/2007 mengenai Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) adalah sebagai berikut:

Tabel.3 Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)

No.	Faktor	Penjelasan
A. Kesiapan dan Keterlibatan Pelaku		
1.	Komitmen Politik Pemerintah Daerah	Adanya komitmen politik yang tinggi dari Pimpinan Daerah dan alokasi anggaran APBD yang memadai untuk penyelenggaraan musrenbang merupakan faktor yang terpenting untuk keberhasilan musrenbang.
2.	Kompetensi Penyelenggara Musrenbang	Penyelenggara musrenbang harus lembaga pemerintah daerah yang kredibel dan mempunyai kewenangan dan otoritas untuk mengambil keputusan.

<p>3.</p>	<p>Kompetensi fasilitator</p>	<p>Fasilitator yang ditugaskan untuk memfasilitasi musrenbang ini harus memiliki keterampilan organisasi, analisis, dan berwawasan luas serta supel. Kriteria umum fasilitator mesti mempunyai pemahaman dan pengetahuan tentang kerangka berfikir strategis, pengalaman memfasilitasi perencanaan strategis; menge-tahui metoda dan teknik partisipatif; memahami karakter daerah; memiliki kesabaran, sikap berorientasi pada hasil, kejujuran dan punya integritas; terbuka, percaya diri dan mampu menangani penolakan; berani mengambil resiko; akomodatif, bertanggung jawab, luwes dan responsif serta terpenting mempunyai kepercayaan bahwa perencanaan partisipatif (keterlibatan aktif stakeholders dalam pengambilan keputusan perencanaan) dapat membawa perubahan yang mendasar pada kesejahteraan masyarakat.</p>
<p>4.</p>	<p>Stakeholders yang dilibatkan</p>	<p><i>Stakeholders</i> yang dilibatkan dalam konsultasi perlu inklusif, yaitu stakeholders yang terpenga-ruh langsung oleh isu dan permasalahan pembangunan daerah; lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan atau otoritas atas isu yang dibahas dan perwakilan masyarakat umum. Stakeholders mencerminkan kepedulian (interests) pada fungsifungsi pemerintahan daerah; stakeholders perlu diidentifikasi dan dianalisis tingkat kepentingannya terhadap isu pembangunan daerah yang dibahas (dari segi kontribusi informasi, sumber daya ataupun keahlian menurut fungsi-fungsi pemerintahan daerah). Peserta Musrenbang RKPDP ini juga harus dihadiri oleh delegasi/peserta yang ditugaskan mengikuti Musrenbang RKPDP berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbang Kecamatan dan kesepakatan Forum SKPD.</p>

5.	Keterlibatan DPRD	Keterlibatan DPRD dalam musrenbang adalah sangat penting, karena banyak pengambilan keputusan perencanaan dan penganggaran yang dilakukan oleh DPRD, sehingga tanpa keterlibatan DPRD sukar dipastikan apakah hasil musrenbang ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari DPRD. Adalah diharapkan bahwa DPRD dapat menyampaikan pokok-pokok pikirannya dalam penyusunan RKPD (sebagai hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukannya di daerah pemilihannya).
6.	Media informasi yang digunakan	Adalah informasi yang perlu disediakan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang. Informasi ini harus disampaikan jauh sebelum waktu pelaksanaan musrenbang, sehingga memungkinkan <i>stakeholders</i> mempelajari dan menguasai permasalahan yang perlu dibahas. Penyajian informasi harus ringkas dan mudah dipahami serta sesuai dengan tingkat pengetahuan <i>stakeholders</i> , sedapat mungkin dilengkapi bentuk visual dan tabel sederhana.

No.	Faktor	Penjelasan
B. Kesiapan Informasi dan Instrumen		
1.	Informasi yang disediakan untuk peserta	Adalah informasi yang perlu disediakan untuk mendukung penyelenggaraan musrenbang. Informasi ini harus disampaikan jauh sebelum waktu pelaksanaan musrenbang agar <i>stakeholder</i> dapat mempelajari dan merencanakan pertanyaan yang perlu diajukan; informasi mesti sedemikian rupa sehingga mudah dipahami dan sesuai dengan tingkat pengetahuan <i>stakeholders</i> . Informasi juga sejauh mungkin berbentuk visual sehingga mudah dipahami.

2.	Tools atau instrumen yang digunakan	Ini berkaitan dengan alat, instrumen, atau format yang digunakan untuk menyerap dan menganalisis aspirasi, pendapat <i>stakeholders</i> .
3.	Penjelasan tujuan penyelenggaraan musrenbang	Tujuan musrenbang perlu dipahami secara jelas oleh peserta musrenbang. Perlu dijelaskan kesepakatan yang akan dituju dan bagaimana proses mencapainya. Perlu juga diberitahukan batasan-batasan yang ada atau harus diikuti oleh Pemerintah Daerah untuk menampung aspirasi; sehingga tidak semua aspirasi dan kebutuhan peserta dapat ditampung dalam RKPD. Penjelasan ini perlu disajikan dalam panduan pelaksanaan Musrenbang.
4.	Alur dan kerangka strategis pembahasan	Adalah alur pembahasan mengikuti proses pemikiran strategis (seperti identifikasi isu, perumusan tujuan, strategi, kebijakan, perumusan program dsb). Alur tersebut harus terlihat dalam penyajian materi yang akan dibahas.

No.	Faktor	Penjelasan
C. Pengorganisasian Alur Proses Musrenbang		
1.	Proses-proses musyawarah sebelumnya	Kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan pada tahapan sebelumnya, yaitu Musrenbang Desa/kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Forum SKPD Kabupaten/kota sangat berpengaruh terhadap keberhasilan musrenbang RKPD, mengingat proses yang dibangun dengan pendekatan “ <i>bottom-up</i> ” dan “ <i>top down</i> ” yang menjamin seluruh kepentingan dapat dipertemukan untuk mencapai kesepakatan.
2.	Waktu pelaksanaan musrenbang	Lama waktu musrenbang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup dan skala issue, permasalahan yang akan dibahas; sebaiknya ada waktu (kesempatan) yang cukup untuk mempelajari, merumuskan pendapat dan mencapai suatu kesepakatan. Penyelengga-raan musrenbang yang

		memadai memerlukan waktu sekitar 2-5 hari.
3.	Metode penyelenggaraan	Musrenbang perlu memenuhi persyaratan penyelenggaraan Konsultasi Publik, <i>focus group discussions (FGD)</i> , lokakarya.
4.	Strategi pelaksanaan musrenbang	Ini berkaitan dengan bagaimana proses pembahasan akan dilakukan untuk mencapai tujuan (keepakatan); pembagian kelompok kerja yang sesuai dengan latar belakang dan kepedulian peserta sehingga mencerminkan ' <i>demand driven</i> ' proses dan alur perencanaan strategis.
5.	Agenda pembahasan yang efisien dan efektif	Adalah pengaturan organisasi dan jadwal kegiatan konsultasi menurut hari, jam, kegiatan dan penanggung jawab kegiatan serta keluaran tiap-tiap kegiatan.

No.	Faktor	Penjelasan
D. Dokumentasi dan Tindak Lanjut Hasil Musrenbang		
1.	Rekaman proses dinamika pembahasan musrenbang	Rekaman proses pelaksanaan konsultasi merupakan analisis dari aspek-aspek penting pembahasan musrenbang seperti bagaimana dinamika pembahasan, keaktifan kelompok kerja, proses mencapai kesepakatan, notulen hasil konsultasi. Rekaman harus dibuat selengkap mungkin. Untuk ini perlu ditugaskan personil khusus yang menangani perekaman proses pelaksanaan musrenbang.

2.	Naskah kesepakatan musrenbang yang sistematis	Adalah naskah kesepakatan (atau rekomendasi) yang dibuat pada akhir musrenbang berisikan secara garis besar butir-butir kesepakatan yang dicapai, siapa yang akan melaksanakan kesepakatan, komitmen, sumber daya dan dana serta waktu diperlukan untuk melaksanakan kesepakatan; penanggung jawab implementasi kesepakatan; mekanisme pemantauan dan evaluasi; penandatanganan naskah kesepakatan oleh <i>stakeholders</i> yang hadir
3.	Pelaporan hasil musrenbang	Laporan hasil musrenbang harus dibuat dan disampaikan kepada semua peserta musrenbang; mencantumkan secara jelas perubahan yang telah dilakukan (apabila ada) sebagai hasil kesepakatan musrenbang.
4.	Pemantauan dan evaluasi tindak lanjut musrenbang	Ini berkaitan dengan kegiatan pasca musrenbang yaitu pengembangan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang perlu dilakukan hingga tahap penyusunan APBD.

Sumber: KEPMENDAGRI, 050-187 (2007)

E. Pemerintah Daerah

4. Pengertian Pemerintah Daerah

Sebelum diamandemen ketentuan mengenai pengaturan tentang pemerintahan daerah terdapat pada Bab IV pasal 18 UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah, bunyi pasal ini:

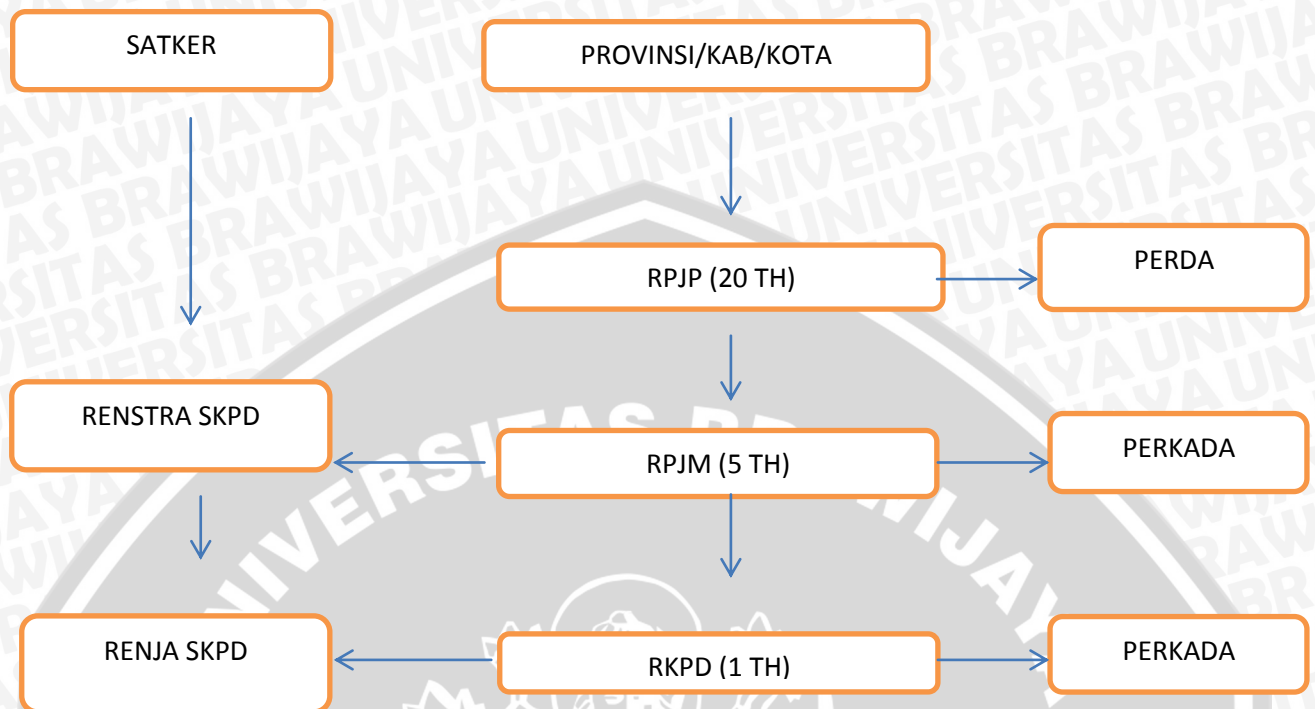
“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ditetapkan bahwa Pemerintahan Daerah:

“Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sesuai dengan perkembangan sejarah Indonesia bahwa sebuah penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada dewasa ini jika dilihat pada tingkatan Hierarkinya pada dasarnya terdiri Pemerintah Propinsi, pemerintah Kabupaten, Pemerintah tingkat Kecamatan, Pemerintah tingkat Desa (Musaneff: 1985: 175).

Pada masa reformasi ini pelaksanaan pemerintah daerah sangat berkembang pesat dengan ditandainya Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan seperti ini memberi kontribusi yang konsekuen nyata terhadap pemberian otonomi yang lebih luas dan besar. Peran pemerintah daerah sangat dibutuhkan sekali dalam sebuah perencanaan pembangunan, sebagai penyerap aspirasi masyarakat daerah dan pembuat program daerah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Dalam gambar dibawah ini akan dipaparkan mengenai pola perencanaan pembangunan daerah dengan keluaran perencanaan yang bersifat kelipatan 5 tahunan:



Gambar 1 Perencanaan Pembangunan Daerah

5. Prinsip dan Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah menurut Undang-Undang No.23 tahun 2014 dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Sedangkan dalam perumusan kebijakan yang bersifat inovasi Pemerintah Daerah mengacu pada prinsip:

- Peningkatan efisiensi;
- Perbaikan efektivitas;
- perbaikan kualitas pelayanan;
- Tidak ada konflik kepentingan;
- Berorientasi kepada kepentingan umum;
- Dilakukan secara terbuka;

- g. Memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan
- h. Dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Asas- asas pemerintahan di daerah muncul sebagai konsekuensi dari pasal 18 Undang-Undang dasar 1945, dengan maksud pemerintah diwajibkan melaksanakan asas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Disamping asas tersebut Undang-Undang ini juga memberikan dasar-dasar bagi penyelenggaraan berbagai urusan pemerintahan di daerah menurut asas tugas pembantuan. Arti, maksud maupun tujuan asas- asas tersebut antarlain:

- a. Asas desentralisasi merupakan urusan pemerintah yang telah diserahkan kepada daerah dalam rangka proses pelaksanaan asas desentralisasi, yang pada dasarnya merupakan wewenang dan tanggung jawab Daerah sepenuhnya. Dalam hal ini prakarsa sepenuhnya diserahkan kepada daerah, baik yang menyangkut penentuan kebijaksanaan, perencanaan pelaksanaan maupun yang menyangkut segi-segi pembiayaannya. Demikian pula perangkat pelaksanaannya adalah perangkat daerah itu sendiri terutama dinas-dinas yang ada di daerah (dalam Musanef: 1985: 180). Sedangkan menurut The Liang Gie (Liang Gie: 1968: 56) desentralisasi merupakan sebuah sistim ketatanegaraan yang berupa pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada satuan organisasi

Pemerintah daerah untuk melaksanakan segenap kepentingan rakyat setempat. Maksud desentralisasi sendiri terutama untuk memupuk kesadaran bernegara dan pemerintah sendiri serta membangun negara seluruhnya khususnya dalam pembangunan ekonomi. desentralisasi yang dimaksud juga bertujuan sebagai perwujudan usaha tercapainya tujuan negara Republik Indonesia yaitu masyarakat sosial yang penuh dengan kebahagiaan materiil dan spiritual.

- b. Asas dekonsentrasi yang merupakan urusan pemerintahan dapat diserahkan kepada daerah menurut asas desentralisasi, maka secara penyelenggaraannya berbagi urusan yang ada di daerah dilaksanakan oleh perangkat Pemerintahan yang ada di daerah berdasarkan pada asas dekonsentrasi. Urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah ini menurut asas dekonsentrasi tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat baik mengenai perencanaan, pelaksanaan, maupun pembiayaan. Unsur pelaksanaannya terutama instansi-instansi vertikal yang dikoordinasikan oleh kepala daerah dalam kedudukannya selaku perangkat pemerintahan pusat, tetapi kebijaksanaan terhadap urusan dekonsentrasi sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.
- c. Asas tugas pembantuan yang merupakan asas dimana beberapa urusan pemerintahan yang ada di daerah sebagian merupakan

urusan Pemerintah Pusat. Akan tetapi berat sekali bagi pemerintahan pusat untuk menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan daerah yang masih menjadi tanggung jawab atas asas dekonsentrasi. Berbagai urusan sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik tanpa keikutsertaan daerah yang bersangkutan. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka undang-undang memberikan kemungkinan untuk dilaksanakannya berbagai urusan pemerintahan di daerah atas asas pembantuan (dalam Musanef: 1985: 181).

Sedangkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 pasal 58 penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, dalam penyelenggaraannya Pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:

- a. Kepastian hukum;
- b. Tertib penyelenggara negara;
- c. Kepentingan umum;
- d. Keterbukaan;
- e. Proporsionalitas;
- f. Profesionalitas;
- g. Akuntabilitas;
- h. Efisiensi;
- i. Efektivitas; dan
- j. Keadilan.

6. Pemerintahan Kecamatan

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.

Bupati/ Walikota menyerahkan urusan wilayah Kecamatan kepada seorang Camat sebagai pemimpin kecamatan dan Camat dibantu oleh staf Pemerintahan Kecamatan, diangkat dari seorang pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan pada pasal 224 Undang-Undang No.23 Tahun 2014.

Kecamatan membawahi beberapa Kelurahan dan Desa sebagai wilayahnya. Pada pasal 221 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2014 menyatakan bahwa daerah kabupaten/ Kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan Desa/Kelurahan. Sedangkan pada ayat (2), Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Perda Kabupaten/ Kota berpedoman pada peraturan Pemerintah.

Dalam perencanaan Kecamatan merupakan fungsi pendekatan atas-bawah dan bawah-atas melalui Musrenbang yang dilaksanakan sesuai amanat Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 261. Sehingga mendekatkan pola koordiansi antar Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan, dan Desa maupun Kelurahan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Pada metode deskriptif menggambarkan data yang dinyatakan verbal dan kualifikasinya bersifat teoretis. Pengolahan data dan pengujian hipotesis bukan berdasarkan pada statistik, melainkan dengan pola berfikir tertentu menurut hukum logika. Penelitian yang bersifat deskriptif dengan tujuan untuk memberi gambaran secara tepat sifat-sifat sebuah individu, keadaan gejala atau kelompok tertentu, sebagai penentu frekuensi atau penyebaran gejala-gejala lain dalam masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang didasarkan terhadap kenyataan yang terjadi di lapangan dan pengalaman responden yang kemudian ditarik rujukan teorinya. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis dan mengutip pendapat dari Sherry R Arenstein tentang partisipasi delapan anak tangga, maka dapat diambil beberapa yang terkait dengan situasi dan kondisi di lapangan, diantaranya:

1. Partisipasi Masyarakat Kecamatan dilihat dari tangga teratas dari model anak tangga partisipasi masyarakat yaitu tanggake VI, VII, dan VIII yaitu:

- a. Kemitraan/Kesetaraan
 - b. Pendelegasian Kekuasaan dan Wewenang
 - c. Pengawasan Masyarakat.
2. Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan, yaitu:
- a. Faktor pendukung yang dilihat dari sisi eksternal dan internal,
 - b. Faktor penghambat dilihat dari sisi eksternal dan internal.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan dimana tempat peneliti melaksanakan penelitian, dimana peneliti dapat melihat keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti untuk mendapatkan data-data yang cukup akurat, sehingga benar-benar mendapatkan data yang berguna untuk penelitian ini. Sebagai upaya pengambilan data dan keberlanjutan observasi, maka lokus penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan situs penelitian merupakan sebuah kondisi dimana seorang peneliti dapat melihat suatu keadaan atau peristiwa yang nyata dari objek yang akan ditelitinya. Dalam penelitian ini yang menjadi situs adalah Kantor Kecamatan Kencong dan Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Jember. Peneliti mengambil daerah ini sebagai lokasi dan situs penelitian didasari oleh keunikan dari Kecamatan Kencong itu sendiri, peneliti melihat tentang bertumbuh pesatnya Kecamatan kencong dan adanya kiprah masyarakat sebagai usaha untuk mendukung

program pemerintah guna memajukan kesejahteraan penduduk. Juga dilandasi dengan potensi yang ada di Kecamatan Kencong seperti kemajemukan penduduk, dan tingkat pendidikan penduduk, selain itu disaat terjadinya beberapa permasalahan seperti masalah pasar dan tambang pasir yang berimbas pada tingginya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan musyawarah melalui pelibatan seluruh lapisan masyarakat.

D. Jenis dan Sumber data

Sumber data merupakan data-data yang akan digunakan dalam penelitian, di dalamnya mencakup orang-orang, peristiwa-peristiwa, serta dokumen-dokumen yang dianggap penting untuk digunakan sebagai fokus. Berdasarkan penelitian ini data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua jenis, antara lain:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh untuk dikumpulkan langsung oleh peneliti di lapangan karena berkaitan langsung terhadap objek yang diteliti. Data primer ini disebut juga data asli yang berbentuk kata-kata yang merupakan data perolehan langsung dari hasil wawancara dengan berbagai sumber. Sumber dari data primer ini yaitu data yang diperoleh dari interview atau mengajukan pertanyaan secara langsung. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari:

- a. Kepala kantor Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
- b. Bagian pelaksanaan Musrenbang kec Kecamatan Kencong.

- c. Narasumber Musrenbang dari Bappeda Kabupaten Jember untuk Kecamatan Kencong.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber-sumber, petunjuk teknis pelaksanaan Musrenbang, dokumen-dokumen resmi yang ada di kantor Kecamatan Kencong dan Bidang Pemerintahan Bappeda Kabupaten Jember berupa citra gambar, laporan kegiatan, maupun dokumen penting lainnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara PPN atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Nomor 0008/ M.PPN/ 01/ 2007 dan 050/264 A/SJ, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007, Profil Kecamatan Kencong. Data sekunder tersebut tidak dapat diabaikan begitu saja karena ada relevansi didalamnya dengan permasalahan dan fokus penelitian sehingga dapat disejajarkan dengan hasil wawancara.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan guna memperoleh data-data sebagaimana yang diperlukan untuk penelitian ini, maka dari itu peneliti menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data sesuai dengan jenis penelitian yang dilaksanakan, yakni penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif, yaitu:

1. Interview (wawancara)

Merupakan metode dimana peneliti mengadakan Tanya jawab atau wawancara langsung dengan informan atau narasumber terkait yang ada di lapangan guna memperoleh keterangan atau informasi yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan yang diangkat oleh peneliti tersebut. Sedangkan narasumber merupakan seseorang yang dikemukakan peneliti pada data primer diatas. Di dalam penelitian kualitatif ini sering kali melakukan penggabungan teknik observasi partisipatif dengan wawancara dan selama peneliti melakukan sebuah observasi juga dilakukannya interview terhadap orang-orang atau narasumber yang terlibat didalamnya.

2. Observasi (pengamatan)

Pada tahap teknik pengumpulan data ini dilaksanakan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan dimana observasi yang akan dilaksanakan adalah observasi terhadap subyek, perilaku subyek selama wawancara, interaksi subyek dengan peneliti, dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Peneliti akan mendatangi narasumber yang terkait di Kecamatan Kencong sebagai acuan penting demi memperoleh data dilapangan, serta di Bidang Pemerintahan Bappeda Kabupaten Jember. Hal ini dilaksanakan supaya peneliti mampu membandingkan keadaan sebenarnya dengan hasil yang diperoleh di lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mendapatkan data dengan memahami, mengamati, serta melakukan pencatatan atau membuat salinan dari

dokumen-dokumen, arsip-arsip, ataupun literature yang terkait dan berhubungan dengan obyek atau permasalahan dalam penelitian yang dilakukan berupa citra gambar/ foto wawancara dan pelaksanaan musrenbang, pedoman wawancara, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan untuk melakukan penelitian, khususnya dalam kegiatan pengumpulan data. Untuk mendukung proses pengumpulan data dan pengambilan data yang diinginkan, peneliti menggunakan instrument penelitian berupa:

1. Peneliti sendiri

Peneliti sendiri yang melakukan penggalian data yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti serta berbagai fenomena yang terjadi yang berkaitan mengenai permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penelitian.

2. Pedoman wawancara (*interview guide*)

Merupakan kerangkaacuan yang berupa materi-materi atau poin-poin yang menjadi dasar dan acuan dalam melakukan wawancara dengan narasumber.

3. Catatan lapangan (*field note*)

Merupakan hasil dari penelitian yang didengar, dilihat, dan dipahami dalam rangka pengumpulan data dan merefleksikan data dalam penelitian kualitatif.

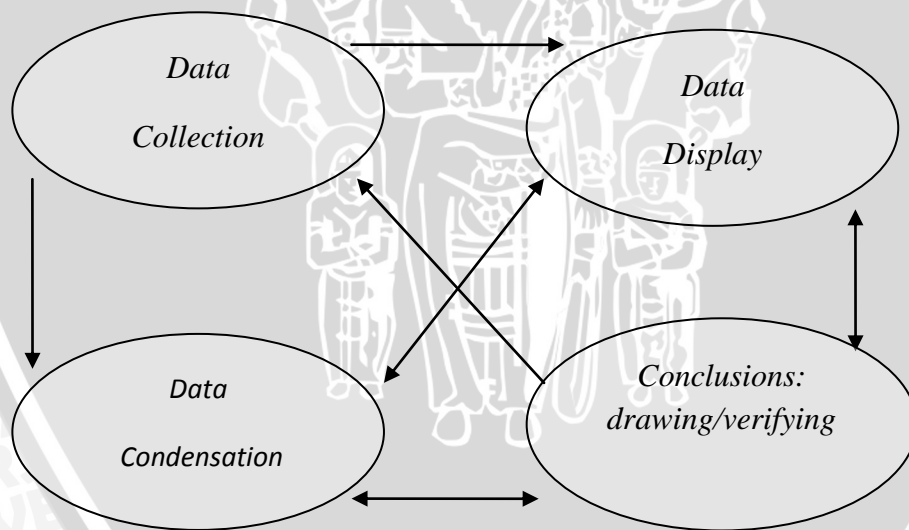
G. Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (2014:33) analisis data kualitatif terbagi menjadi 4 proses dalam menyajikan sebuah data diantaranya dari mengumpulkan data yang ada (*Data collection*), pertama merupakan kondensasi data (*Data condensation*), tampilan data (*Data display*), dan kesimpulan (*Conclusions*).

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*), merupakan proses pengumpulan dan pencarian data terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti.
2. Kondensasi Data (*Data Condensation*): merupakan proses memilah data, pemfokus, penyederhanaan, meringkas data yang ada baik itu dari tulisan, catatan lapangan, hasil transkrip wawancara, dokumen-dokumen, arsip-arsip, dan bahan-bahan empiris lainnya.
3. Penyajian data (*Data display*) dalam (Miles, Huberman and Saldana 2014:31) mengemukakan "*The most frequent form of display for qualitative data in the past has been extended text.*" Jadi yang paling sering digunakan dalam penyajian data penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat diperpanjang. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan dalam memahami

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

4. Penarikan kesimpulan (*Conclusions*), kemudian pada tahap yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. (Sugiyono, 2014:99) mengemukakan bahwa kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada, temuan dapat berupa deskripsi atau suatu gambaran obyek yang sebelumnya masih belum pasti sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal/interaktif, hipotesis/teori.



Gambar 3 *Qualitative data analysis* (Miles, Huberman, and Saldana 2014:33)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis Kabupaten Jember

Kabupaten Jember secara astronomis terletak pada posisi $6^{\circ}27'29''$ s/d $7^{\circ}14'35''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}59'6''$ s/d $8^{\circ}33'56''$ Lintang Selatan dengan luas wilayah seluas $3.293,34 \text{ Km}^2$ dan memiliki ± 76 pulau-pulau kecil dengan pulau terbesar adalah Pulau Nusa Barong. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Jember memiliki batas :

- Sebelah Utara : Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Probolinggo
- Sebelah Selatan: Samudera Indonesia
- Sebelah Timur: Kabupaten Banyuwangi
- Sebelah Barat : Kabupaten Lumajang

Penggunaan lahan di Kabupaten Jember didominasi oleh fungsi kegiatan budidaya, dimana lahan yang dibudidayakan untuk pertanian adalah seluas 46,41 % dari luas wilayah, sedangkan sisanya digunakan untuk permukiman seluas 9,93 %, hutan seluas 21,17 % dan lain-lain seluas 22,49 %.

2. Kondisi Topografis

Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0 – 3.330 meter di atas

permukaan laut. Daerah dengan ketinggian 100 – 500 meter di atas permukaan air laut merupakan kawasan terluas, yaitu 1.240,77 km² atau 37,68 % dari luas wilayah Kabupaten Jember sedangkan kawasan tersempit adalah daerah dengan ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut dengan luas 31,34 km² atau 0,95 % dari luas wilayah Kabupaten Jember.

Kabupaten Jember memiliki karakter topografi dataran ngarai yang subur pada bagian Tengah dan Selatan serta dikelilingi oleh pegunungan yang memanjang pada batas Barat dan Timur. Di wilayah Barat Daya memiliki dataran dengan ketinggian 0 – 25 meter di atas permukaan laut, sedangkan di wilayah Timur Laut yang berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan wilayah Tenggara yang berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi memiliki ketinggian di atas 1.000 meter di atas permukaan air laut.

Secara administrasi Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 Kecamatan, 22 Kelurahan dan 246 Desa. Pembagian wilayah administrasi Kabupaten Jember berikut luasnya dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel. Nama, luas Wilayah Per-Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa

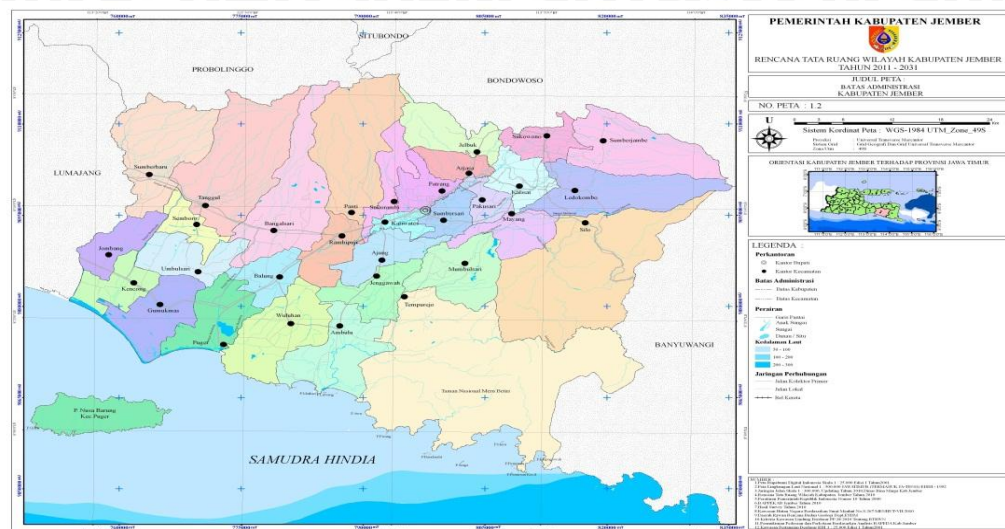
No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(km ²)	(%) thd Total
1.	Kencong	5	65,92	2,001615

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(km ²)	(%) thd Total
2.	Gumukmas	8	82,98	2,519631
3.	Puger	12	148,99	4,523979
4.	Wuluhan	7	137,18	4,165376
5.	Ambulu	7	104,56	3,174892
6.	Tempurejo	8	524,46	15,92487
7.	Silo	9	309,98	9,412329
8.	Mayang	7	63,78	1,936636
9.	Mumbulsari	7	95,23	2,891593
10.	Jenggawah	8	51,02	1,549187
11.	Ajung	7	56,61	1,718924
12.	Rambipuji	8	52,80	1,603236
13.	Balung	8	47,12	1,430766
14.	Umbulsari	10	70,52	2,141291
15.	Semboro	6	45,43	1,379451
16.	Jombang	6	54,30	1,648782
17.	Sumberbaru	10	166,37	5,05171
18.	Tanggul	8	198,99	6,042194
19.	Bangsalsari	11	175,28	5,322256
20.	Panti	7	160,71	4,879848
21.	Sukorambi	5	60,63	1,840988
22.	Arjasa	6	43,75	1,328439

No.	Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa	Luas Wilayah	
			(km ²)	(%) thd Total
23.	Pakusari	7	29,11	0,883905
24.	Kalisat	12	53,48	1,623883
25.	Ledokombo	10	146,92	4,461125
26.	Sumberjambe	9	138,24	4,197562
27.	Sukowono	12	44,04	1,337244
28.	Jelbuk	6	65,06	1,975502
29.	Kaliwates	7	24,94	0,757286
30.	Sumbersari	7	37,05	1,124998
31.	Patrang	8	36,99	1,123176
		248	3.293,34	100

Sumber : Diolah dari beberapa data sekunder

Sedangkan jika dilihat dari peta administratif Kabupaten Jember serta cakupan kajian Buku Putih sanitasi tergambar dalam gambar berikut:



Gambar Peta 2.1: Peta kabupaten Jember dan cakupan Wilayah Kajian

3. Demografi

a. Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Jember berdasarkan hasil sensus penduduk Tahun 2010 tercatat sebanyak 2.329.929 jiwa, terdiri dari 1.143.766 jiwa penduduk laki-laki dan 1.186.163 jiwa penduduk perempuan, dengan sex ratio di Kabupaten Jember sebesar 96,43. Dari tahun ke tahun jumlah penduduk Kabupaten Jember relatif terus bertambah. Jika dibandingkan dengan Tahun 2009, penduduk Kabupaten Jember bertambah 14.227 jiwa atau sebesar 0,61 %. Jika dibandingkan dengan hasil sensus penduduk Tahun 2000, maka selama 10 (sepuluh) tahun terjadi penambahan penduduk sebanyak 142.272 jiwa atau pertumbuhan rata-rata penduduk sebesar 0,63 % per tahun.

b. Persebaran dan Kepadatan

Distribusi penduduk Kabupaten Jember dapat dikatakan

tersebar secara merata untuk masing-masing kecamatan. Kecamatan dengan jumlah penduduk paling banyak adalah Kecamatan Sumber Sari dengan 125.981 jiwa (5,41 %), sedangkan Kecamatan Jelbuk merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu 31.967 jiwa (1,37 %). Kepadatan penduduk rata-rata di Kabupaten Jember pada Tahun 2010 adalah 707,47 jiwa/km². Kepadatan penduduk paling tinggi adalah di Kecamatan Kaliwates dengan tingkat kepadatan sebesar 4.479,55 jiwa/km², sedangkan Kecamatan Tempurejo memiliki tingkat kepadatan terendah dengan 134,71 jiwa/km².

Tabel 2.3 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Saat ini dan Proyeksinya untuk 5 tahun

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah KK			Tingkat Pertumbuhan		
		Tahun			Tahun			Tahun		
		n	n + 1	n+4	n	n+1	n+4	n	n+1	n+4
1.	Kencong	65.127								
2.	Gumukmas	79.162								
3.	Puger	114.332								
4.	Wuluhan	114.652								
5.	Ambulu	104.962								
6.	Tempurejo	70.649								
7.	Silo	108.757								
8.	Mayang	48.408								

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah KK			Tingkat Pertumbuhan		
		Tahun			Tahun			Tahun		
		n	n + 1	n+4	n	n+1	n+4	n	n+1	n+4
9.	Mumbulsari	62.323								
10.	Jenggawah	80.908								
11.	Ajung	74.377								
12.	Rambipuji	78.671								
13.	Balung	76.782								
14.	Umbulsari	69.311								
15.	Semboro	43.861								
16.	Jombang	54,30								
17.	Sumberbaru	166,37								
18.	Tanggul	199,99								
19.	Bangsalsari	175,28								
20.	Panti	160,71								
21.	Sukorambi	60,63								
22.	Arjasa	43,75								
23.	Pakusari	29,11								
24.	Kalisat	53,48								
25.	Ledokombo	146,92								
26.	Sumberjambe	138,24								
27.	Sukowono	44,04								
28.	Jelbuk	65,06								
29.	Kaliwates	24,94								

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah KK			Tingkat Pertumbuhan		
		Tahun			Tahun			Tahun		
		n	n + 1	n+4	n	n+1	n+4	n	n+1	n+4
30.	Sumbersari	37,05								
31.	Patrang	36,99								

Sumber : Jember dalam angka

4.Sosial dan Budaya

Berdasarkan data Kantor Departemen Agama Kabupaten Jember, Kabupaten Jember Dalam Angka 2010 tercatat bahwa jumlah bangunan masjid 2.355 buah,, bangunan mushola 10.285 buah, bangunan gereja Kristen Protestan 72 buah, bangunan gereja Kristen Katholik 14 buah, bangunan pura 12 buah dan bangunan vihara 2 buah.

Banyaknya sekolah dan kelas negeri dan swasta tahun pelajaran 2010/2011 di Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Banyaknya sekolah dan kelas negeri dan swasta tahun pelajaran 2010/2011

No.	Kecamatan	TK		SD/MI		SMP/MT S		SMA/MA N		SMK		PT	
		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
1.	Kencong	1	30	25	21	3	7	1	1	-	3	-	-
2.	Gumukmas	-	29	35	23	2	14	-	4	-	4	-	-

No.	Kecamatan	TK		SD/MI		SMP/MT S		SMA/MA N		SMK		PT	
		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
3.	Puger	-	45	43	24	2	16	-	6	-	4	-	-
4.	Wuluhan	-	48	37	33	2	17	-	4	-	3	-	-
5.	Ambulu	1	46	40	24	2	14	1	5	-	6	-	-
6.	Tempurejo	-	26	45	6	3	10	-	1	-	4	-	-
7.	Silo	-	33	42	22	5	10	-	4	-	1	-	-
8.	Mayang	-	12	23	13	2	15	-	2	-	1	-	-
9.	Mumbulsari	-	12	21	14	2	8	1	1	-	-	-	-
10.	Jenggawah	1	30	27	16	2	16	1	2	-	4	-	-
11.	Ajung	-	23	18	13	2	13	-	1	-	2	-	-
12.	Rambipuji	-	26	31	10	3	12	1	3	-	2	-	-
13.	Balung	-	38	26	24	3	13	1	4	-	3	-	-
14.	Umbulsari	-	32	31	18	3	7	1	2	-	2	-	-
15.	Semboro	-	16	19	6	1	7	-	2	1	-	-	-
16.	Jombang	-	24	22	13	2	8	1	2	-	1	-	-
17.	Sumberbaru	-	22	45	35	3	12	-	3	1	2	-	-
18.	Tanggul	-	27	35	22	8	13	2	5	1	4	-	-
19.	Bangsalsari	-	28	46	23	4	17	-	9	-	4	-	-
20.	Panti	1	25	20	20	2	10	-	11	-	2	-	-
21.	Sukorambi	-	14	20	7	1	8	-	1	1	2	-	-
22.	Arjasa	-	7	21	3	4	-	1	-	-	-	-	-
23.	Pakusari	-	13	18	2	1	3	1	-	-	1	-	-

No.	Kecamatan	TK		SD/MI		SMP/MT S		SMA/MA N		SMK		PT	
		N	S	N	S	N	S	N	S	N	S	N	S
24.	Kalisat	1	15	40	5	4	10	1	4	-	4	-	-
25.	Ledokombo	-	16	33	6	3	7	-	2	-	1	-	-
26.	Sumberjambe	-	11	30	9	5	6	-	2	-	-	-	-
27.	Sukowono	-	22	26	7	5	10	1	1	-	3	-	-
28.	Jelbuk	-	4	18	6	3	6	-	2	-	1	-	-
29.	Kaliwates	1	47	25	16	6	18	3	11	-	3	1	1
30.	Sumbersari	-	43	31	13	4	11	2	5	1	8	2	6
31.	Patrang	-	34	28	10	6	13	2	4	3	9	1	-
	2010	6	79 8	92 1	46 4	98	33 2	18	10 6	8	84	4	7

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Kabupaten Jember Dalam Angka Tahun 2010

Keterangan : N : Negeri

S : Swasta

Tabel 2.9: Jumlah penduduk miskin per kecamatan

No.	Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin
1.	Kencong	3.155
2.	Gumukmas	3.507
3.	Puger	5.004
4.	Wuluhan	4.448
5.	Ambulu	6.035

No.	Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin
6.	Tempurejo	9.199
7.	Silo	13.340
8.	Mayang	8.407
9.	Mumbulsari	10.864
10.	Jenggawah	7.220
11.	Ajung	5.905
12.	Rambipuji	5.650
13.	Balung	5.668
14.	Umbulsari	4.349
15.	Semboro	2.933
16.	Jombang	4.349
17.	Sumberbaru	13.982
18.	Tanggul	9.344
19.	Bangsalsari	15.187
20.	Panti	7.495
21.	Sukorambi	4.826
22.	Arjasa	7.293
23.	Pakusari	7.925
24.	Kalisat	16.746
25.	Ledokombo	15.758
26.	Sumberjambe	12.726
27.	Sukowono	11.694

No.	Kecamatan	Jumlah Keluarga Miskin
28.	Jelbuk	6.377
29.	Kaliwates	4.908
30.	Sumpalsari	6.035
31.	Patrang	7.425

Tabel 2.10: Jumlah rumah per kecamatan

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah
Kencong	19,155
Gumukmas	23,283
Puger	33,627
Wuluhan	33,721
Ambulu	30,871
Tempurejo	20,779
Silo	30,517
Mayang	14,238
Mumbulsari	18,330
Jenggawah	23,796
Ajung	21,876
Rambipuji	23,139
Balung	22,583
Umbulsari	20,386
Semboro	12,900

Jombang	14,696
Sumberbaru	29,138
Tanggul	24,289
Bangsalsari	33,504
Panti	17,625
Sukorambi	11,145
Arjasa	11,191
Pakusari	12,235
Kalisat	21,991
Ledokombo	18,324
Sumberjambe	17,713
Sukowono	17,309
Jelbuk	9,402
Kaliwates	32,859
Sumbersari	37,053
Patrang	27,785

sumber : Jember dalam
angka2011

5.Kelembagaan Pemerintah Daerah

Setelah adanya perubahan SOTK di Pemerintah Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Jember dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah an Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Jember. Nama Satuan Kerja Perangkat Dearah pemerintah Kabupaten Jember yang masuk dalam Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi adalah sebagai berikut : Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Jember, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Jember, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (BAPPEKAB) Jember, Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jember, Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten Jember.

6. Sejarah Kecamatan Kencong

Dalam perkembangannya sejarah Kecamatan Kencongsekitarnya ada 4 bukti sejarah yang menjadi acuan awal tentang keberadaan Kecamatan Kencong di abad ke 19 sampai 20 (Setiyo: 2012: 10-11), berawal dri artikel yang ditulis oleh J. Hageman Jcz, Kentjong yang masih menggunakan eajaan lama merupakan bagian dari wilayah Poeger yang berbatasan langsung dengan wilayah Loemadjang di bagian barat. Sumber ini didasarkan pada perjalanan Hageman sendiri dan mengambil referensi dari penulis sebelumnya Junghuhn, Zollinger, dan Bosch serta Horsfield. Hageman menyebut Kencong bagian dari Poeger, Junghuhn yang berkunjung ke Kencong tahun 1844 dalam rangka melakukan perjalanan ke Loemadjang, Djember, dan Bondowoso menyebutkan bahwa adanya post kindjung, selanjutnya adalah peta milik Menvill mengenai daerah Residentie Bezoekie dan peta Residentie Probolinggo. Peta Residentie Bezoekie menunjukkan

dengan jelas posisi Kencong dengan nama Kentjang yang dapat ditempuh dari Jossowilangun(Lamadjang), dan ditemukan nama lain yang berdekatan dengan Kentjang seperti Ketting, Menampoe, dan Poeger. Posisi kencong dimana sebagai pos dimana pada masa kolonial Belanda, tahun 1844 menunjukkan telah adanya sarana yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi, sosial dan politik di wilayah yang menjadi pos. Catatan selanjutnya oleh Van Westersch Grootbedriff yang berisikan mengenai laporan pembangunan empat suiker fabriek atau pabrik gula, yaitu Djatiroto, Semboro, Goenongsari yang berada di wilayah Kencong.

Hal tersebut merupakan sedikit catatan sejarah mengenai Kecamatan Kencong yang bertumbuh sampai dengan keadaan sekarang ini, dimana pembangunan fasilitas publik terus dilakukan dan tidak mengindahkan adanya bukti sejarah dari Kecamatan Kencong itu sendiri.

7. Visi, Misi, dan Strategi Pembangunan Kecamatan Kencong

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kencong yang kreatif, bersih dan berwibawa untuk mewujudkan masyarakat Kencong yang agamis dan bermartabat.

b. Misi

- 1) Meningkatkan kualitas sumberdaya aparatur dalam fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Mendorong terwujudnya partisipasi/kemandirian masyarakat dalam proses pembangunan.
- 3) Mewujudkan, memelihara, dan meningkatkan pelayanan yang bermutu, merata dan terjangkau.
- 4) Meningkatkan upaya pengendalian dan penanggulangan terhadap gangguan dan ancaman.
- 5) Mendidik masyarakat untuk lebih mandiri dalam penyusunan program pembangunan.
- 6) Menumbuh kembangkan budaya tertib hukum.
- 7) Koordinasi yang mantap antara Musyawarah Pimpinan Kecamatan, Desa, dan Dinas Instansi Sektoral.
- 8) Memberikan leglitas dan kepastian hukum dan hasil layanan.

8. Kondisi Wilayah Geografis dan Demografis

Secara astronomis wilayah Kecamatan Kencong berada pada posisi $8^{\circ} .10' 8^{\circ} .20'$ Lintang Selatan dan $6^{\circ} .30' - 6^{\circ} .40'$ Bujur Timur, sebagai wilayah tropis Kecamatan Kencong memiliki dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Sebagian besar wilayah Kecamatan Kencong adalah dataran rendah yang berada diantara 0 meter sampai 12 meter diatas permukaan laut. Sedangkan luas Kecamatan Kecong adalah $58,68 \text{ km}^2$.

Batas Kecamatan Kencong secara administratif, sebelah utara berbatasan langsung dengan wilayah Kecamatan Jombang dan Umbulsari.

Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Gumukmas kemudian sebelah selatan berbatasan langsung dengan Samudra Indonesia. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang.

Secara geografis wilayah Kecamatan Kencong memiliki tiga sumberdaya: daratan (*land resources*), sumberdaya laut (*marine resources*), dan udara (*air resources*). Sumberdaya ini menyangkut berbagai aspek klimatologi, hidrologi (pola pengairan), biotis (mahluk hidup), serta manusia (sosio kultur). Sebagai bagian dari Pulau Jawa wilayah Kecamatan Kencong mempunyai ciri umum yang mirip dengan wilayah pulau jawa lainnya. Kecamatan Kencong terletak di bagian setatan sebelah timur Pulau Jawa, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember yang merupakan termasuk bagian dari *Java's Oosthoek* (pojok timur raya) yang memiliki pantai dan berbatasan dengan samudra Indonesia. Bagian utara wilayah Kecamatan Kencong yang membujur dari timur ke barat merupakan dataran rendah. Sedangkan bagian selatan terhampar luas lautan Indonesia, dan Pulau Nusa Barong apat terlihat dari Pantai Pasebang yang masih termasuk wilayah Kecamatan Kencong.

a. Data Kependudukan

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan suatu daerah. Tinggi rendahnya mobilitas penduduk dalam satu daerah merupakan salah satu indikator dalam menentukan kemajuan daerah. Pemerintah Daerah secara terus menerus wajib melaksanakan pemutakhiran data penduduk melalui Pendapatan Penduduk dan Pencatatan Sipil yang

dikelola dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan (SIAK). Jumlah penduduk Kecamatan Kencong Kabupaten Jember seluruhnya adalah 72.710 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki dan perempuan sebagaimana data berikut.

Tabel Tinggi, Luas dan Jarak Kantor Desa dengan Ibukota Kecamatan

Desa/Kelurahan	Ketinggian Wilayah (mdpl)	Luas (km ²)	Jarak dengan Ibukota Kecamatan (m)
1. Paseban	9	7,29	10
2. Cakru	9	10,66	7
3. Kraton	9	9,63	7
4. Wonorejo	9	16,81	1
5. Kencong	9	13,5	2
Jumlah		58,65	

Sumber: Buku Lomba Camat (2015)

Tabel Jumlah Penduduk Kecamatan Kencong Berdasarkan Jenis Kelamin

Desa	Jenis Kelamin			Jumlah Kepala Keluarga
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Jiwa	
1. Paseban	4.136	3.928	8.064	2.634
2. Cakru	5.644	5.534	11.178	3.718
3. Kraton	5.282	5.255	10.537	3.352
4. Wonorejo	7.635	7.686	15.321	5.021
5. Kencong	14.057	13.749	27.806	8.355
Jumlah	36.754	36.152	72.906	23.060

Sumber: Buku Lomba Camat (2015)

b. Mata Pencaharian Penduduk

Mata pencaharian merupakan aktifitas manusia untuk memperoleh taraf hidup yang layak dimana antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya berbeda sesuai dengan taraf kemampuan penduduk dan keadaan demografinya. Mata pencaharian adalah keseluruhan kegiatan untuk mengeksploitasi dan memanfaatkan

sumberdaya yang ada pada lingkungan fisik, sosial, budaya yang terwujud sebagai kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Mayoritas mata pencaharian penduduk Kecamatan Kencong adalah 7% pertanian sedangkan 30%nya adalah terbagi pada bidang perdagangan, peternakan, dan perikanan, guru swasta, PNS serta karyawan.

c. Agama dan Kepercayaan

Kehidupan umat beragama di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember peduli dengan kerukunan meskipun mayoritas penduduk beragama islam namun toleransi dan keharmonisan antar umat beragama tetap terjalin dengan baik.

9. Keadaan Sosial

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam proses pembangunan bangsa karena masa depan bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan, sehingga pendidikan merupakan tempat ketergantungan harapan masa depan masyarakat bangsa, dan negara. Jumlah data pendidikan anak usia dini sewilayah Kecamatan Kencong untuk kategori kelompok bermain kurang dari 3 tahun berjumlah 10, untuk anak usia dini berjumlah 19 unit dan untuk taman kanak-kanak ada 31 unit, sedangkan untuk pendidikan tingkat atas ada 26 unit sekolah dasar dan 18

Madrasah, 7 sekolah lanjutan tingkat atas pertama, 7 sekolah menengah atas, dan 1 perguruan tinggi.

b. Keagamaan

Pembangunan di bidang keagamaan dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kegiatan tersebut diikuti oleh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, tokoh agama. Berkenaan dengan hal itu ada beberapa kegiatan yang dilakukan, seperti pelaksanaan safari ramadhan atau kunjungan keagamaan ke desa-desa, menghadiri undangan peringatan hari besar lainnya. Jumlah tempat ibadah di Kecamatan Kencong ini terdapat 298 mushola, 43 masjid, 6 gereja, dan 1 pura.

c. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang sangat penting dalam proses pembangunan berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan kesehatan lingkungan.

Guna meningkatkan akses pelayanan kesehatan terhadap masyarakat dilaksanakan dengan penambahan tenaga medis dan para medis serta peningkatan sarana dan prasarana kesehatan. Dari data yang diperoleh data posyandu desa menurut klasifikasi,

terdapat 80 posyandu dengan 65 posyandu purnama dan 15 posyandu mandiri. Tenaga kesehatan di wilayah Kecamatan Kencong terdapat 5 dokter umum, 1 orang dokter gigi, 17 orang bidan, 13 orang perawat, 33 dukun bayi terlatih. Sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Kencong terdapat 2 puskesmas, 2 poliklinik swasta, 4 puskesmas pembantu, 3 poliklinik desa, dan 3 puskesmas keliling.

10. Organisasi Sosial Kemasyarakatan.

Organisasi sosial kemasyarakatan merupakan kumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan.

Organisasi masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Kencong antara lain: Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ortomnya, disamping itu ada kelompok-kelompok pengajian dan rukun kematian.

11. Kondisi Kesejahteraan Penduduk.

Untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk di wilayah Kecamatan Kencong masih bertumpuh pada sektor pertanian sebagai sektor paling utama, sedangkan sektor jasa dan industri masih menempati posisi kedua setelah pertanian. Bersumber dari data BPS di tingkat Kecamatan Kencong

ada 63% penduduk yang bekerja disektor pertanian, perdagangan 9%, konstruksi dan industri 2%, angkutan 1%, dan 23% pada sektor lainnya. Sedangkan untuk perkembangan pendapatan regional perkapita di Kecamatan Kencong mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan dasar ADHB dan ADHK.

12. Potensi Sumberdaya Alam

Tempat wisata Pantai Paseban merupakan obyek wisata pantai yang terbentang cukup panjang dan bersih serta dapat melihat ke arah Pulau Nusa Barong. Daya tarik yang dimiliki oleh Pantai Paseban adalah atraksi melihat deburan ombak yang menggulung indah serta adanya kegiatan tahunan pekan raya setiap lebaran samapai seminggu setelah lebaran. Pantai ini juga terkenal akan "*sand dune*" sebuah bukit-bukit pasir hitam dengan berbagai jenis tumbuhan khas pantai. Pada sepanjang pantai ini juga terbentang jalur lintas selatan yang sebagian telah teraspal sebagai akses untuk jalan popinsi, selain itu potensi perikanan juga sangat cukup, yang tidak kalah adalah terkandungnya bisi beji dengan kualitas baik di sepanjang pantai ini dan masih saat ini masih menjadi sengketa antara masyarakat, peusahaan tambang, dan pemerintah daerah.

13. Potensi Perhubungan

Keberhasilan pembangunan dibidang perhubungan dicerminkan oleh indikator perhubungan. Jumlah aset sarana prasarana perhubungan mengalami kenaikan setiap tahunnya serta bertambahnya pelayanan urusan perhubungan yang dapat diberikan melalui penyediaan informasi dan

sarana prasarana perhubungan. Kondisi infrastruktur 50% sudah beraspal. Khususnya pada jalur utama desa, 50% lainnya merupakan jalan makadam dan pengerasan.

Selain itu di Kecamatan Kencong di dukung oleh sub terminal untuk angkutan umum seperti bus, taxi, dan angkutan pedesaan serta jasa angkut barang umum dan ekspedisi.

14. Kondisi Aparatur Kecamatan

Jumlah aparatur di Kantor Kecamatan Kencong sebanyak 33 orang baik dengan kategori PNS atau non PNS, dengan jumlah laki-laki 29 orang dan perempuan 4 orang.

B. Penyajian Data

1. Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.

a. Kemitraan/Kesetaraan

Perencanaan pembangunan yang baik harus mengedepankan hubungan yang baik dan setara antara perencanaan yang berasal dari masyarakat (*bottom up*) maupun perencanaan dalam pembangunan yang berasal dari pemerintah langsung (*top down*) sehingga tujuan dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dan mempunyai kedudukan yang kuat dalam tahap pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan.



Perencanaan pembangunan sangat membutuhkan masyarakat sebagai titik berat pelaksanaan pembangunan, sehingga menumbuhkan kembangkan kepedulian masyarakat untyuk berpartisipasi dalam pembangunan khususnya kecamatan sangat penting sebagai upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat juga sebagai pendorong utama pembangunan kecamatan berdasarkankeyakinan yang didapatkan bahwa masyarakat yang mampu terlibat aktif dalam proses perencanaan maupun pembangunan lebih memiliki rasa tanggung jawab sehingga terwujudnya masyarakat yang partisipatif secara mandiri dalam pembangunan. Oleh karenanya diperlukan musyawarah sebagai pola kemitraan/kesetaraan antara pelaku pembangunan terkait sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang dihadapidalam pembangunan maupun lingkungan sosial masyarakat itu sendiri. Musyawarah ini juga disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan di tingkat paling bawah yaitu RT/RW sampai pada tingkat Nasional.

Gambar Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kencong Tahun 2015



.Sumber: Dokumentasi Acara Musrenbang

Gambaran umum mengenai Musrenbang itu sendiri sebagai pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam membangun partisipasi pembangunan kedepan sesuai dengan pernyataan Bapak BK (L, 51, selaku wakil dari Bappeda Kabupaten Jember) mengatakan bahwa:

“Sesuai dengan UU No.25 Th. 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dan sesuai mekanisme tahunan dalam pembangunan harus diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, sampai nasional untuk serap informasi *bottom up* menggandeng masyarakat dan pemangku kepentingan terkait sehingga nanti otomatis tahu kebutuhan masyarakat sampai ke plosok wilayah”. (Hasil wawancara tanggal 09 Juli 2015, pukul 11.00 WIB di kantor Bappeda PB.Sudarman Jember)

Kegiatan musyawarah ini juga bertujuan untuk meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam mencari alternatif solusi

permasalahan yang ada secara bersama dengan upaya memasukkan perencanaan yang baik dengan mengedepankan tahapan prioritas pembangunan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, kebutuhan, dan sumberdaya yang dimiliki oleh masyarakat dan pemerintah.

Gambar Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Kencong Th. 2015



Sumber: Dokumentasi Acara Musrenbang

Pentingnya perencanaan pembangunan kecamatan yang partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat Kecamatan (MUSRENBANGKEC) Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dan sangat perlunya masyarakat untuk ikut dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, sesuai yang disampaikan oleh Bapak SJ(L, 52 tahun, selaku Kepala Kecamatan Kencong dan juga masyarakat Kecamatan Kencong), mengatakan bahwa:

“Musrenbang itu dirasa sangat penting untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan erat kaitannya dengan partisipasi dalam perencanaan pembangunan, dengan dilibatkan masyarakat dalam perencanaan otomatis masyarakat juga akan mempunyai rasa tanggungjawab dalam melaksanakan tahapan pembangunan”.(Hasil

wawancara tanggal 06 Juli 2015, pukul 11.00 WIB di Kantor Kecamatan Kencong).

Sejalan dengan pernyataan diatas, Bapak DK (L, 45, selaku Sekretaris Desa Cakru Kecamatan Kencong dan peserta kegiatan Musrenbang) menjelaskan bahwa:

“Musrenbang untuk menyerap seluruh usulan dari masyarakat mulai dari bawah dibawa ke tingkat atas, sehingga terwujud pembangunan yang berlandaskan dengan apa yang dibutuhkan masyarakat, sehingga selain *top down* pembangunan juga berlandaskan aspirasi masyarakat atau *bottom up*”..”(Hasil wawancara tanggal 07 Juli 2015, pukul 11.30 WIB di Balai Desa Cakru Kecamatan Kencong).

Dan dengan di dukung oleh jawaban Bapak UH (L, 51, Masyarakat Kecamatan kencong) mengatakan bahwa:

“Musrenbang ini bagi kita sebagai masyarakat merupakan forum silaturahmi, urun rembuk untuk pembangunan kedepan, kami sangat senang dilibatkan dalam kegiatan seperti ini supaya uneg-ueg kami sebagai masyarakat dapat tersalurkan yang nantinya akan menjadi masukan buat pemerintah begitu singkat menurut kami”..”(Hasil wawancara tanggal 21 November 2015, pukul 19.00 WIB via alat telekomunikasi).

Dari hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan Musrenbangkec, khususnya di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember sangat penting untuk menyaring seluruh aspirasi masyarakat dan menggandeng masyarakat untuk menjadi mitra bersama dalam pelaksanaan pembangunan dan sebagai upaya partisipasinya.

b. Pendelegasian Kekuasaan dan Wewenang

Musrenbang Kecamatan dilalui dengan beberapa tahap, mulai dari tingkat RT/RW, dusun, Desa selanjutnya dibawa ke tingkat Kecamatan, pendelegasian wewenang yang dimantapkan adalah terpusat dan terarah sesuai mandat dari pemerintah tingkat atas baru di *breakdown* dan di laksanakan Musrenbang mulai tingkat bawah.

Pelaksanaan Musrenbang pada tingkat kecamatan dimulai pada tingkat Dusun dan nanti pada tingkat Kecamatan, dan pada tingkat Kecamatan ada pendelegasian sebagai wakil dari aspirasi masyarakat yang sudah disampaikan pada tingkat bawah. Di Kecamatan Kencong juga sudah terdapat Sirenbang (Sistem Perencanaan Pembangunan) yang memudahkan Kecamatan untuk mengirimkan usulan ke tingkat Kabupaten dengan cepat melalui sistem *online* tetapi tetap mengedepankan kebutuhan dari masyarakat dan dipilah sesuai bidangnya, sehingga aspirasi masyarakat lebih cepat terserap dan direalisasikan. Hal ini diutarakan langsung oleh, Bapak BE (L, 47, selaku sekretaris pelaksana Musrenbang Kecamatan Kencong):

“Musrenbang dimulai dari tilik dusun, selanjutnya desa dan kecamatan, dan kabupaten. Sebelum adanya Musrenbang Kabupaten dilakukannya sirenbang dengan sistem *online* dimana musrenbang dari kecamatan diusulkan ke tingkat Kabupaten. Istilah lainnya yaitu pelaporan hasil Musrenbang secara *online* dan dipilah-pilah sehingga ini masuk bidang apa, ini bidang apa.” (Hasil wawancara tanggal 07 Juli 2015, pukul 09.00 WIB di Kantor Kecamatan Kencong Kabupaten Jember).

Pelaksanaan Musrenbangkec ini sudah mengacu pada prinsip dan tahapan pembangunan, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan juga *monitoring* meskipun dalam pelaksanaannya masih terkendala dengan tingkat kehadiran atau kepedulian dari masyarakat yang sudah di beri wewenang untuk menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan di Kecamatan Kencong Melalui Musrenbang dari para pihak terkait, yang membahas tentang serangkaian kegiatan pembangunan yang bertujuan menumbuhkan keterampilan dan lapangan kerja, pengelolaan sumberdaya alam dan manusia dengan baik, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesehatan, serta sarana dan prasarana yang menunjang kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Kencong, baik sarana transportasi, kondisi irigasi, maupun sistem pemerintahan desa. Di dalam Musrenbang Kecamatan Kencong masyarakat diberi kuasa penuh untuk menyampaikan seluruh aspirasinya melalui pendelegasian kepada perangkat desa maupun wakil dari masyarakat sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan disampaikan pada forum Musrenbang Kecamatan yang tentu nantinya hasil aspirasi yang disetujui pada tingkat Kecamatan inilah yang nantinya akan dibawa ketataran Musrenbang tingkat Kabupaten. Sesuai dengan apa yang sudah tertera pada berita acara Musrenbang Kecamatan Kencong bahwa:

Peserta yang mempunyai wewenang/utusan penuh yakni perwakilan dari masing-masing desa sesuai hasil keputusan

Musrenbang Desa dan juga pemnangku kepentingan terkait, seperti tokoh masyarakat maupun lembaga lainnya.

Dan sesuai dengan pernyataan bapak UH (L, 51, Masyarakat Kecamatan kencong) bahwa:

“kita sebagai masyarakat tahu bahwa peran kita biasanya hanya menyampaikan pendapat atau uneg-uneg dalam pembangunan, namun kita juga tahu bahwa pemerintah melaksanakan pembangunan atas dasar usulan-usulan dari kita tersebut, sehingga kita sama-sama tahu tugas dari masing-masing keterlibatannya”..”(Hasil wawancara tanggal 21 November 2015, pukul 19.00 WIB via alat telekomunikasi).

Penelitian yang dilakukan pada Kecamatan Kencong juga memperoleh data dimana proses pelaksanaan Musrenbang melibatkan kinerja PNPM, yang juga merupakan fasilitator yang membantu Kecamatan untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat desa yang nantinya akan dibawa kedalam Musrenbang Kecamatan. Dengan melibatkan PNPM ini hasilnya sangat memuaskan dan tentunya sangat membantu pihak Kecamatan dalam penyelenggaraan kegiatan Musrenbang ini. Sesuai dengan penjelasan Bapak BE (L, 47, selaku Sekretaris pelaksana Musrenbang di Kecamatan Kencong) bahwa:

“dengan diadakannya fasilitator kecamatan maupun teknik, Musrenbang yang dipandu oleh PNPM itu malah berkualitas sehingga lebih terinci dan lebih baik, untuk dibuat perangkaan, seperti prioritas desa yang sangat membutuhkan. Sangat bagus sekali bekerjasama dengan PNPM dan merasa terbantu”..”(Hasil wawancara tanggal 07 Juli 2015, pukul 09.00 WIB di Kantor Kecamatan Kencong Kabupaten Jember).

Dan didukung oleh penjelasan dari Bapak BK(L, 51, selaku wakil dari Bappekab Kabupaten Jember untuk wilayah Kecamatan Kencong) mengatakan bahwa:

“Kerjasama PNPM itu bagus karena membantu sekali dalam mngakomodir kinerja Pemerintah dalam merencanakan pembangunan, dan cukup meningkatkan partisipasi masyarakat karena langsung terjun juga ke desa.”(Hasil wawancara tanggal 09Juli 2015, pukul 11.00 WIBdikantor Bappekab PB.Sudarman Jember)

c. Pengawasan Masyarakat

Pengawasan masyarakat dalam Musrenbang di tingkat Kecamatan Kencong sangat diperlukan guna terus memberikan pengawasan terhadap pembangunan, dalam hal ini Pemerintah Kecamatan Kencong sudah berupaya maksimal mungkin untuk mengajak masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Bapak SJ (52, L, selaku Kepala Kecamatan Kencong):

Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pembangunan sangat penting dimana masyarakat ikut serta di setiap kegiatan pembangunan, seperti di Kencong ini masyarakat dilibatkan dengan ikut serta memonitoring kegiatan entah itu secara fisik maupun nonfisik, sehingga bila ada penyimpangan dapat langsung dilaporkan”.(Hasil wawancara tanggal 06Juli 2015, pukul 11.00 WIBdi Kantor Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)

Dengan adanya hal tersebut masyarakat dimampukan untuk memberi pengawasan langsung terhadap pembangunan, juga dengan adanya kegiatan Musrenbang ini secara tidak langsung masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan perencanaan pembangunan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang bersifat partisipatif melalui Musrenbang di Kecamatan Kencong.

Setelah dilakukan penelitian melalui pelaksanaan perencanaan pembangunan yang bersifat pasrtisipatif di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, diketahui beberapa faktor pendukung maupun penghambat yang terjadi dalam pelaksanaan Musrenbangkec:

a. Faktor Pendukung

a.1 Perspektif Eksternal

Sebagai faktor pendukung dalam Musrenbang di Kecamatan Kencong tentunya adalah keadaan masyarakat sekitar, sumberdaya yang cukup, dan usulan-usulan penting dari masyarakat juga pengarahan dari Pemerintah Kecamatan Kencong maupun Kabupaten Jember sangat menjadi daya dukung yang penting di dalam pelaksanaan Musrenbang tersebut. Dimana hal tersebut juga menunjang bagaimana sebuah kebijakan pembangunan akan dilaksanakan ke depannya sehingga mampu meningkatkan apa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

a.2 Perpektif Internal

Sebagai faktor pendukung juga adanya pembantuan fasilitator dari para rekan PNPM yang membantu untuk merangkul seluruh stakeholder dalam pelaksanaan perecanaan pembangunan membuat pelaksanaan

Musrenbang di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember menjadi lebih terarahkan dan berkualitas. Faktor sumberdaya dan penyampaian informasi mengenai Musrenbang juga menjadi faktor penting untuk mendorong partisipasi masyarakat. Dengan adanya upaya-upaya pemerintah tersebut menjadi faktor pendukung dari sisi internal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, seperti yang dijelaskan oleh Bapak SJ(L, 52, selaku Kepala Kecamatan Kencong dan juga masyarakat Kecamatan Kencong), mengatakan bahwa:

“adanya penyuluhan dan pembangunan masyarakat yang berbasiskan gotongroyong, secara tidak langsung akan memupuk rasa partisipatif yang tinggi juga di dalam masyarakat itu sendiri”. (Hasil wawancara tanggal 06 Juli 2015, pukul 11.00 WIB di Kantor Kecamatan Kencong Kabupaten Jember).

Dan didukung oleh pernyataan Bapak BK(L, 51, selaku perwakilan dari Bappeda Kabupaten Jember) mengatakan bahwa:

“upaya pembinaan juga dilakukan lintas sektoral dan terjun langsung ke desa-desa, dan juga melalui siaran keliling, bahkan ada dialog solutif dengan bapak bupati langsung dan jaring asmara (aspirasi masyarakat) yang dilakukan oleh DPR”. (Hasil wawancara tanggal 09 Juli 2015, pukul 11.00 WIB di kantor Bappekab PB. Sudarman Jember).

b. Faktor Penghambat:

Faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan perencanaan pembangunan melalui kegiatan Musrenbang di Kecamatan Kencong adalah:

b.1 Perpektif Eksternal

Tingkat kehadiran delegasi atau masyarakat dan kurangnya rasa kesadaran masyarakat terhadap kegiatan Musrenbang, hal ini dimungkinkan juga ditengarai oleh faktor dari masyarakat yang kurang puas tentang usulan mereka yang terkadang tidak terakomodir dengan baik dan tidak terealisasikan pada pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan, sebagai penghambat pelaksanaan Musrenbang juga, faktor pemahaman masyarakat yang kurang mengenai usulan dalam musrenbang itu sendiri, masyarakat belum mampu membedakan antara mana kebutuhan mereka dan keinginan mereka, memang hal ini hanya berbeda tipis tetapi Pemerintah juga mengalami kesulitan dalam merumuskan program prioritas terhadap pembangunan kalau masyarakat mengutarakan semua keinginan mereka, namun dengan mereka mengerti apa yang dibutuhkan diharapkan kebutuhan ini lebih mengerucut untuk diusulkan sehingga program yang ada nantinya sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bapak BK(L,51, selaku wakil dari Bappeda Kabupaten Jember dalam Musrenbang di Kecamatan Kencong) mengatakan bahwa:

“kendalanya pertama usulan dari masyarakat masih berdasarkan kepentingan bukan kebutuhan, sumberdaya

manusia masih agak kurang. Masyarakat yang mengusulkan belum mampu memilah mana yang kebutuhan dan mana yang kepentingan dan ada juga yang masih mementingkan keluarganya atau kerabatnya, itu yang menjadi kendala ketika di lapangan”.(Hasil wawancara tanggal 09 Juli 2015, pukul 11.00 WIB dikantor Bappekab PB.Sudarman Jember)

b.2 Perspektif Internal

Faktor anggaran yang tidak begitu cukup untuk mengakomodir seluruh masukan dari masyarakat, sehingga harus diprioritaskan untuk Pembangunan di Kabupaten Jember, sebesar 40% dari seluruh total anggaran Kabupaten Jember, dengan 30% untuk non fisik dan 70% sebagai upaya pemberdayaan masyarakat Hal ini cukup menyebabkan tingkat kepercayaan dan tanggung jawab masyarakat menurun dan berimbas pada tingkat partisipasi masyarakat yang menurun pula. Seperti yang telah diutarakan oleh Bapak BE(L, 47, selaku sekretaris pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Kencong) mengatakan bahwa:

“Banyak orang menilai bahwa Musrenbang seolah tidak sesuai dengan harapan mereka, dan lebih cenderung berjalan stagnan, makanya seolah masyarakat ada yang bersifat acuh terhadap Musrenbang”.(Hasil wawancara tanggal 07 Juli 2015, pukul 09.00 WIB dikantor Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)

Bapak Bambang Erwin juga mengatakan bahwa hambatan juga muncul ketika usulan tersebut masuk atau dikirim ke

tingkat Kabupaten, beliau menambahkan bahwa adanya faktor intervensi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat mengubah usulan masyarakat yang sudah disepakati bila hal tersebut tidak masuk atau sejalan dengan keinginan mereka, sehingga hal ini juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat yang berimbas pada menurunnya partisipasi masyarakat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa faktor penghambat, seperti faktor dari masyarakat itu sendiri kurang mengertinya masyarakat terhadap Musrenbang dan faktor dari pemerintah yang mengalami keterbatasan anggaran dan sumberdaya sehingga aspirasi masyarakat tidak terakomodir seluruhnya, maka diperlukan solusi-solusi dimana mengupayakan pembangunan masyarakat melalui keterbukaan pemikiran mereka akan pentingnya musrenbang, dimana penyuluhan dan sosialisasi sebelum Musrenbang perlu dilakukan dan menanamkan pengertian transparansi anggaran terhadap masyarakat sehingga usulan mereka juga menjadi lebih mengerucut dan sudah diperhitungkan sebelum diusulkan.

C. Pembahasan

1. Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember.

Partisipasi masyarakat di Kecamatan Kencong ini dalam Musrenbang jika dilihat dari teori kadar partisipasi yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein (1969) sebagai *ladder of participation* (tangga partisipasi) dengan pengklasifikasian partisipasi sebagai kekuasaan masyarakat dalam melakukan pengaruh perubahan dalam pembuatan kebijakan pembangunan. Teori ini diklasifikasikan kedalam delapan anak tangga partisipasi.

Bila dilihat dari delapan anak tangga derajat partisipasi menurut Arnstein, maka sesuai data yang didapatkan pada partisipasi masyarakat dalam musrenbang di Kecamatan Kencong, masih berada pada derajat diatas dimana dengan dilaksanakannya musrenbang tersebut dan masyarakat yang cukup partisipatif untuk mengikuti, sekaligus Pemerintah sebagai pengarah dan fasilitator dalam kegiatan musrenbang maka dapat dikategorikan dengan tingkatan partisipasi sebagai kekuatan masyarakat (*degrees of citizen power*) dimana tangga yang masuk adalah tangga ke enam sampai angka teratas yaitu angka delapan:

Tabel. 1. Model Delapan Anak Tangga Partisipasi Masyarakat

TANGGA KE	BENTUK PARTISIPASI	KATEGORI
VIII	Pengawasan Masyarakat	Tingkatan partisipasi sebagai kekuatan

VII	Pendelegasian Kekuasaan dan Kewenangan	masyarakat (<i>Degrees of Citizen Power</i>)
VI	Kemitraan/ Kesetaraan	
V	Perdamaian/ Kompromi	
IV	Berkonsultasi	Tingkatan partisipasi yang bersifat semu atau pseudo (<i>Tokenisme</i>)
III	Memberi Informasi	
II	<i>Therapy</i> (diagnosa untuk pengobatan dan penyembuhan)	Tingkatan bukan partisipasi
I	Memanipulasi (Rekayasa)	

Sumber: Sherry R Arnstein (1969)

a. Kemitraan/Kesetaraan

Bentuk partisipasi masyarakat di dalamnya telah digambarkan melalui penelitian di kecamatan Kencong dalam kemitraan dan kesetaraan masyarakat dan pemerintah merumuskan perencanaan pembangunan dengan aspirasi bersama dimana keputusan didasarkan pada aspirasi masyarakat dan disaring oleh Pemerintah sesuai dengan kebutuhan, sumberdaya, dan disesuaikan anggaran.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dalam pelaksanaannya dilakukan melalui proses kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dengan beberapa tahapan di dalamnya, seperti tahap persiapan Musrenbang, tahap pelaksanaan Musrenbang, dan adanya evaluasi dalam Musrenbang.

Berdasarkan data, sebelum diadakannya Musrenbang pada tingkat Kecamatan didahului dulu oleh tilik dusun, Musrenbang tingkat Desa, selanjutnya pelaksanaan tingkat Kecamatan. Se jauh ini Musrenbang sangat berperan sekali untuk menumbuhkan rasa partisipasi dan tanggung jawab masyarakat. Perencanaan pembangunan melalui Musrenbang ini sudah memenuhi ciri konsep perencanaan yang dipaparkan menurut Vught (1982) (dalam Syafrudin: 1993: 8-12), ada beberapa ciri konsep dalam perencanaan diantaranya, perencanaan secara proses, perencanaan beruang lingkup rasional, perencanaan secara meningkat (*incremental*), perencanaan transaktif, dan perencanaan strategi.

Musrenbang selain sebagai sarana untuk pembangunan dan kemitraan masyarakat juga melatih masyarakat untuk bersikap secara mandiri sehingga nantinya rakyat dapat lebih mudah untuk menghadapi situasi sulit serta dapat menemukan pemecahan permasalahan di dalam pembangunan yang bersifat negatif. Untuk meningkatkan partisipasi dalam msrenbang di Kecamatan Kencong juga menyuluhkan kembali kegiatan gotong royong dimana kegiatan ini juga sangat berpengaruh dalam partisipasi masyarakat, sesuai pendapat pokok mengenai partisipasi menurut Keith Davis (dalam Sastropetro Santoso: 1986: 51):

“Partisipasi masyarakat dalam bentuk swadaya gotong-royong merupakan modal utama. Swadaya adalah kemampuan masyarakat yang dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar pemenuhan kebutuhan”.

d. Pendelegasian Kekuasaan dan Wewenang

Masyarakat sudah mampu bersikap kreatif untuk membantu mengambil keputusan dan memberikan saran mengenai pembangunan yang direncanakan, tetapi dengan batasan tidak langsung menentukan keputusan apa yang harus dilaksanakan. Cara ini diyakini dapat meningkatkan inisiatif, kreatifitas, dan disiplin juga semngat dari masyarakat itu sendiri dengan mengurangi sikap kaku dari pemerintah. Selain itu pemerintah juga mampu dan harus menerapkan dan melaksanakan proses partisipasi dengan menumbuhkan pengertian dan kesadaran masyarakat maupun *stakeholder* lainnya.

Bentuk partisipasi tangga ketujuh mengenai pendelegasian kekuasaan dan kewenangan dapat terlihat pada Musrenbang dengan melibatkannya beberapa lapisan masyarakat seperti, tokoh masyarakat, perangkat Desa dan Kecamatan, sektor swasta, maupun masyarakat yang terlibat itu sendiri. pendelegasian kekuasaan dan kewenanagan ini juga mengacu dimana peran Pemerintah dan stakeholder yang berbeda dalam mengatur jalannya pelaksanaan Musrenbang.

Tingkat partisipasi dalam Musrenbang di Kecamatan Kencong sendiri bila dilihat secara keseluruhan cukup tinggi meskipun dalam pelaksanaan masih adanya ketidak hadiran dari anggota masyarakat, dan ada juga masyarakat yang bersikap acuh terhadap pelaksanaan Musrenbang ini. Tingkat partisipasi masyarakat juga dipengaruhi oleh realisasi usulan/aspirasi

yang disampaikan diterima ataukah tersaring kembali oleh Pemerintah, hal ini juga memunculkan paradigma didalam masyarakat dimana ketika usulan mereka kurang diterima oleh pemerintah maka akan timbul rasa kecewa dibenak masyarakat sehingga berpengaruh juga terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang. Di lihat dari perbedaan tingkatan berdasarkan tiga tingkatan yang ada dalam berpartisipasi (Sastropoetro Santoso: 1986: 47-49), antara lain tingkat saling mengerti, tingkat penasihat/sugesti, dan tingkat otoritas dimana dengan tujuan untuk membantu anggota kelompok untuk memahami sikap dan fungsi masing-masing sehingga lebih terarah dan banyak dilibatkan secara lebih kreatif dan bertanggung jawab, dimana dalam Musrenbang Kecamatan Kencong ini apa yang dikehendaki masyarakat dengan pemerintah masih cukup. Pemerintah sudah berupaya semampu mungkin untuk melibatkan masyarakat dalam menuangkan aspirasi mereka dan memfasilitasi untuk saling melihat realisasi dari pelaksanaan aspirasi tersebut sebagai wujud tanggung jawab kedua belah pihak. Dari ketiga tingkatan tersebut dimungkinkan partisipasi masyarakat dalam realisasi Musrenbang di Kecamatan Kencong berada pada poin kedua yaitu pada tingkat penasihat/sugesti dimana kelompok atau anggota masyarakat sudah mengerti dan telah memahami masalah maupun situasi yang dihadapi oleh mereka, meskipun dalam kenyataannya terjadi juga kesimpangan antara penyampaian aspirasi berdasarkan kepentingan atau kebutuhan, namun pada hakikatnya masyarakat sudah mampu menyampaikan aspirasi yang akan mereka sampaikan dalam musyawarah.

e. Pengawasan Masyarakat

Pada tangga kedelapan dengan bentuk partisipasi pengawasan masyarakat sesuai dengan data penyajian penelitian ini bahwa masyarakat diajak untuk lebih bertanggung jawab dalam pengawasan pembangunan, dengan cara melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik. Oleh karena itu tingkat partisipasi masyarakat disini menjadi kekuatan penting dalam perencanaan pembangunan karena pembangunan itu pada hakekatnya dari masyarakat dan untuk masyarakat.

Namun dapat juga tingkat partisipasi masyarakat ini menurun masuk kedalam kategori tingkat partisipasi yang bersifat semu atau pseudo, dimana partisipasi masyarakat melemah akibat rasa kepercayaan terhadap kegiatan musrenbang melemah. Hal tersebut dapat terjadi apabila usulan mereka banyak tersaring oleh kepentingan banyak pihak jadi usulan tersebut tidak murni dari kebutuhan masyarakat, akan tetapi lebih cenderung kepada kepentingan lain pihak. Seperti penelitian yang sudah dilakukan bahwa adanya intervensi yang berlebihan dari anggota wakil rakyat dengan menyaring kembali aspirasi masyarakat yang sudah tetuang Musrenbang yang kurang sesuai dengan kehendak mereka, hal tersebut bahkan dapat memicu distorsi partisipasi dalam masyarakat. Oleh karena itu perlu peningkatan kegiatan yang bersifat partisipasi masyarakat yang berlebih untuk menumbuhkan rasa kebersamaan di dalam masyarakat.

2. Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Kencong.

Perencanaan pembangunan di Kecamatan yang bersifat partisipatif melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) di Kecamatan Kencong berdasarkan penelitian ada yang menjadi faktor penghambat dan juga faktor pendukung.

a. Faktor Pendukung

1. Faktor Eksternal

Sebagai faktor pendukung kelancaran dalam perencanaan pembangunan khususnya pelaksanaan Musrenbang adalah sikap partisipatif masyarakat yang besar, aspirasi dari peserta yang telah disampaikan, rata-rata pendidikan yang cukup dari masyarakat. Berdasarkan data yang diterima banyak sekali usulan dari masyarakat dalam Musrenbangkec selain dari segi fisik dan non fisik. Usulan atau masukan tersebut meliputi berbagai usulan yang dikemukakan oleh peserta Musrenbang agar disesuaikan dengan anggaran yang ada pada Pemerintah daerah guna menunjang pembangunan wilayah. Usulan ini sangat penting guna mendukung kelancaran pelaksanaan musrenbang di tingkat Kecamatan guna merumuskan program kegiatan pembangunan selanjutnya yang harus dilaksanakan. Sebagai wujud pembangunan yang berlandaskan aspirasi dari bawah (*bottom up*) pemerintah mengajak

masyarakat untuk merumuskan bersama perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan melalui program Musrenbang, hal ini sesuai dengan tugas pembangunan seperti yang di dikemukakan oleh (Riant Nugroho: 2003; 23):

“Memihaki yang lemah, agar menjadi kuat dan mandiri, dan Menjaga yang kuat, agar tidak jatuh menjadi lemah, bahkan kalau bisa menjadi mitra pemerintah untuk mengangkat yang lemah”.

2. Faktor Internal

Sebagai faktor pendukung internal pemerintah telah berupaya untuk merangkul seluruh *stakeholder* dan menyampaikan informasi semaksimal mungkin dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan di dalam pembangunan dengan adanya pembantuan juga dari PNPM di Kecamatan Kencong dan pemimpin yang kooperatif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan kedepannya.

b. Faktor Penghambat

1. Faktor Eksternal

Dalam Musrenbang di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dalam partisipasi perencanaan pembangunan hambatan yang masih ditemukan yaitu adanya masyarakat yang kurang mengerti tentang Musrenbang sehingga usulan dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat cenderung lebih menedepankan

kepentingan daripada kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga pemerintah juga harus menyaring kembali aspirasi masyarakat yang telah tersalurkan setelah Musrenbang. Disini juga mungkin ditengarai dimana kondisi masyarakat yang tidak mempunyai informasi cukup dengan anggaran guna realisasi seluruh aspirasi masyarakat yang tertampung. Kondisi seperti ini sesuai pendapat yang disampaikan oleh Muluk (2007:152) bahwa:

“Perwujudan partisipasi publik dalam pemerintahan daerah di Indonesia bukanlah hal yang mudah karena masyarakat belum terbiasa dengan partisipasi aktif dan sukarela. Kondisi ini disebabkan penerapan paradigma tersebut masih berada dalam dalam transisi menuju demokrasi”.

2. Faktor Internal

Faktor yang lain adalah faktor kepentingan dimana tidak tersinkronisasi dengan baik antara kebutuhan rakyat dengan kepentingan wakil rakyat yang notabene juga menjadi pemilah kebutuhan-kebutuhan rakyat yang telah tersampaikan di Musrenbang, sehingga rakyat yang tadinya berharap akan usulan tersebut terealisasi terjadi rasa kecewa dan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang selanjutnya jika hal tersebut tidak disikapi dengan baik. Seperti yang dikemukakan oleh Amartya Sen mengenai pembangunan adalah untuk membebaskan manusia kepada kemanusiaannya; agar ia memperoleh haknya untuk memilih dari berbagai pilihan

kehidupan bagi diri dan lingkungannya. Pembangunan yang selama ini hanya berorientasi pada angka paradigma, teori mesin, uang dan kekuasaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember

- a. Kemitraan/Kesetaraan

Musrenbang sebagai kemitraan/kesetaraan antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun partisipasi pelaksanaan pembangunan kedepan, sebagai penumbuh rasa kepercayaan, keselarasan dan rasa tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan maupun pembangunan kedepannya. Lewat hal tersebut dapat diambil kesimpulan partisipasi yang terbangun di Kecamatan Kencong pada Musrenbang sudah berdasarkan pola kemitraan dan kesetaraan dimana masyarakat dan pemerintah bekerjasama dan mampu merumuskan mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kedepannya.

b. Pendelegasian kekuasaan dan kewenangan

Pemerintah Kecamatan Kencong dalam pelaksanaan Musrenbang hal pendelegasian kekuasaan dan kewenangan sudah memberikan kuasa penuh kepada masyarakat untuk menyampaikan seluruh aspirasi dalam pembangunan tentunya juga melalui pengawasan dari Pemerintah langsung, keberpihakan penuh terhadap masyarakat dimana hal ini dibuktikan dengan aspirasi-aspirasi masyarakat yang telah tersampaikan untuk modal perencanaan pembangunan ke depannya meskipun seluruh aspirasi tersebut belum terealisasi sepenuhnya dalam pembangunan karena beberapa faktor terkait.

c. Pengawasan Masyarakat

Melalui pengawasan masyarakat Pemerintah Kecamatan Kencong mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan bersama dalam pembangunan maupun pelaksanaan dan evaluasi dalam pembangunan, dimana masyarakat juga diminta ikut terlibat dalam memonitoring pelaksanaan pembangunan yang ada di lapangan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan di Kecamatan Kencong:

- a. Faktor Pendukung eksternal, pelaksanaan Musrenbang itu sendiri adalah faktor lingkungan, sikap partisipatif masyarakat yang besar dan aspirasi yang telah disampaikan, disamping itu rata-rata pendidikan yang cukup dari masyarakat juga sebagai faktor pendukung untuk melihat kualitas dan pelaksanaan perencanaan dalam pembangunan melalui kegiatan Musrenbang.
- b. Faktor Pendukung Internal, faktor dari pemerintah sendiri, sikap pemimpin yang kooperatif, faktor penyampaian informasi mengenai perencanaan pembangunan yang baik, usaha untuk merangkul masyarakat dalam proses perencanaan maupun pembangunan.
- c. Faktor Penghambat eksternal dari pelaksanaan Musrenbang Kecamatan,. Faktor penghambat dimana kurang mengertinya masyarakat mengenai usulan yang disampaikan, masih mengedepankan kepentingan bukan kebutuhan dan kurangnya informasi mengenai anggaran untuk merealisasi usulan masyarakat, sehingga tidak ada prioritas yang dituju dalam pembangunan dan berakibat juga tidak tertampungnya aspirasi masyarakat secara keseluruhan.
- d. Faktor Penghambat Internal, adanya faktor kepentingan lain yang sangat berpengaruh sekali terhadap usulan atau masukan mengenai kebutuhan pembangunan dari masyarakat saat

Musrenbang dimana kebutuhan yang sudah tersampaikan dapat dimungkinkan kurang maksimal dalam realisasinya di lapangan, hal tersebut sangat mempengaruhi sikap partisipatif masyarakat dengan menimbulkan kekecewaan masyarakat sehingga dapat menyebabkan turunnya angka partisipasi masyarakat terhadap nilai perencanaan maupun pembangunan.

B. Saran

1. Pelaksanaan Musrenbang perlu dilakukan penyuluhan mengenai pengertian maksud dan tujuan dari kegiatan Musrenbang itu sendiri terhadap masyarakat agar seluruh masukan dari masyarakat berdasarkan kebutuhan dan kapasitas anggaran. Musrenbangkec di Kecamatan Kencong ini sebenarnya sudah dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait, namun tentunya perlu ditingkatkan kembali melalui penyuluhan tersebut, sosialisasi di setiap perkumpulan warga masyarakat untuk memberikan wawasan, pemahaman, sekaligus pencerahan agar masyarakat mengerti akan perencanaan maupun pembangunan, sehingga partisipasi aktif masyarakat meningkat secara berkualitas pada kegiatan-kegiatan selanjutnya dengan hasil dokumen maupun pelaksanaan pembangunan yang lebih terlaksana maksimal.
2. Untuk lebih meningkatkan kembali pola partisipatif di Kecamatan Kencong harus sering diadakan kegiatan yang bersifat menumbuhkan

rasa kebersamaan seperti penghidupan kembali kegiatan dialog solutif, dialog mengenai pembangunan wilayah lingkungan sekitar yang dilaksanakan antar warga masyarakat di lingkungan Kecamatan Kencong. Dorongan-dorongan tersebut berguna sebagai pendidikan politik juga untuk masyarakat sehingga lebih peduli untuk mengontrol negara, dorongan ini juga dimaksudkan untuk memberikan ruang gerak partisipasi masyarakat yang lebih terbuka sehingga nantinya hasil perencanaan pembangunan tidak bersifat teknokratis dan didominasi oleh *elite* Pemerintahan.

3. Strategi lain yang dapat diterapkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat mungkin perlu memberikan *reward* dalam Musrenbang bagi yang hadir juga sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Juga diperlukan adanya sosialisasi terhadap masyarakat akan seberapa besar anggaran dan usulan masyarakat dapat tertampung, sehingga tidak memunculkan perspektif bahwa usulan mereka kurang diterima di dalam Musrenbang karena terkendala anggaran atau hal yang berpengaruh lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis, Bambang Supriono, dan Muluk. (2012). *Jurnal Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pendekatan Sistem Lunak (Soft System)*. Diambil dari Academia.edu
- Abe A. (2002). *Perencanaan Daerah: Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonomi Daerah*. Laperapustaka, Yogyakarta.
- Berita Acara Musrenbang. (2015). Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
- Huberman, Miles. (2014). *Qualitative data analysis*. United States of America, SAGE Publications. Inc.
- Juliantara, D. (2004). *Pembaruan Kabupaten Mewujudkan Kabupaten Partisipatif*. Yogyakarta, Pembaruan.
- Kencana, Inu. (2002). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/187/Kep. Bangda/2007/ tentang Pedoman dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
- Lemhannas. *Pembangunan Nasional*. (1997). Jakarta, Balai Pustaka-Lemhannas.
- Lomba Camat. (2015). Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
- Muluk, (2007). *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Malang, Bayu media Publishing.
- Musanef. (1985). *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta, Gunung Agung.
- Nugroho, Riant. (2003). *Reinventing Pembangunan*. Jakarta, Elex Media Komputindo
- Riyadi dan Bratakusumah. (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah. Strategi Menggali Potensi dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rohman, Ainur. 2012. *Partisipasi Warga Dalam Pembangunan Demokrasi*. Malang, Averroes Press.
- Sastropoetro, Santoso. (1986). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*. Bandung, Alumni.

- Sjafrudin, Ateng. (1973). *Pemerintah Daerah dan Pembangunan*. Bandung, Bandung Press.
- Supadmi, Utin. (2013). Pelaksanaan Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Di Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Diambil dari *Jurnal Untan.ac.id*
- Suryono, Agus. (2010). *Dimensi-Dimensi Prima Teori Pembangunan*. Malang, Universitas Brawijaya Press.
- Tjokrominoto, Moeljarto. (1996). *Pembangunan Dilema Dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- The Liang Gie. (1968). *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah*. Jakarta, Gunung Agung.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Y.Hadi Setiyo. 2012. *Perkembangan Awal Kencong Sebagai Kota*, Jember: Taman Baca Budaya Salam
- Tjokroamidjojo, Bintoro. (1995). *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Jakarta, PT. Pustaka LP3ES Indonesia.

Lampiran



Pedoman Wawancara (*Interview Guide Research*)**Untuk Penelitian dengan Judul****PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM REALISASI MUSYAWARAH****PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) TINGKAT****KECAMATAN****(Studi Pada Pelaksanaan Musrenbang Di- Kecamatan Kencong, Kabupaten-
Jember)****Yang dilakukan oleh :****Oskar Janata Agasi Al Hilal****(115030600111011)****Mahasiswa Strata 1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya****Jenis data :****Nama Narasumber :****Alamat :****Jabatan :****Pendidikan :****A. Pertanyaan ditujukan kepada Kepala atau Pegawai dan Bagian yang
menangani program Musrenbang**

1. Bagaimana pandangan mengenai Musrenbang?

.....
.....
.....
.....

2. Sesuai dengan prinsipnya bahwa pembangunan harus sesuai dengan tahapannya (perencanaan, pelaksanaan, monitoring? apakah Musrenbang ini sudah memenuhi kaidah tersebut?

3. Bagaimana mekanisme Musrenbang secara keseluruhan? dan siapa saja *stakeholder* yang terlibat?

4. Dalam perencanaan pembangunan tentu harus melibatkan masyarakat sebagai proses partisipasi maupun musyawarah bersama dalam menentukan tujuan pembangunan, seberapa besar keterlibatan masyarakat disini?

5. Bagaimana pandangan Pemerintah selama ini terhadap Masyarakat mengenai Musrenbang: peduli atau kurang peduli?



6. Pola koordinasi dan komunikasi seperti apa yang dilakukan Pemerintah dengan Masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang?

.....
.....
.....
.....
.....

7. Bagaimana proses perencanaan pembangunan yang partisipatif di Kecamatan Kencong dalam kegiatan Musrenbang?mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun monitoring kegiatan Musrenbang?

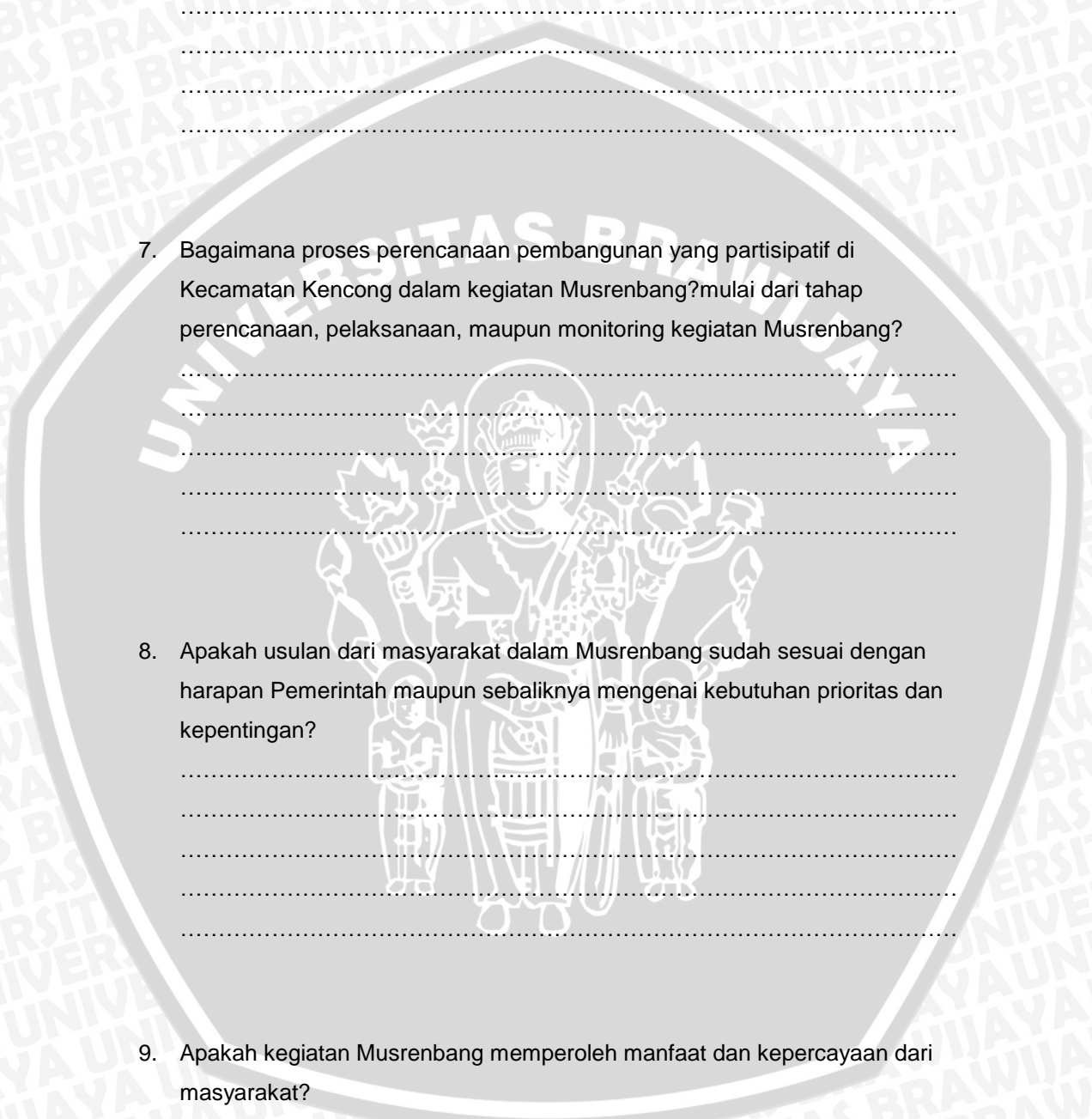
.....
.....
.....
.....

8. Apakah usulan dari masyarakat dalam Musrenbang sudah sesuai dengan harapan Pemerintah maupun sebaliknya mengenai kebutuhan prioritas dan kepentingan?

.....
.....
.....
.....

9. Apakah kegiatan Musrenbang memperoleh manfaat dan kepercayaan dari masyarakat?

.....
.....
.....
.....



10. Apakah kegiatan Musrenbang ini mempunyai nilai yang cukup untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dan partisipatif di Kecamatan Kencong ini?

.....
.....
.....
.....

11. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kesadaran, kepercayaan, dan partisipasi masyarakat dalam usrenbang?

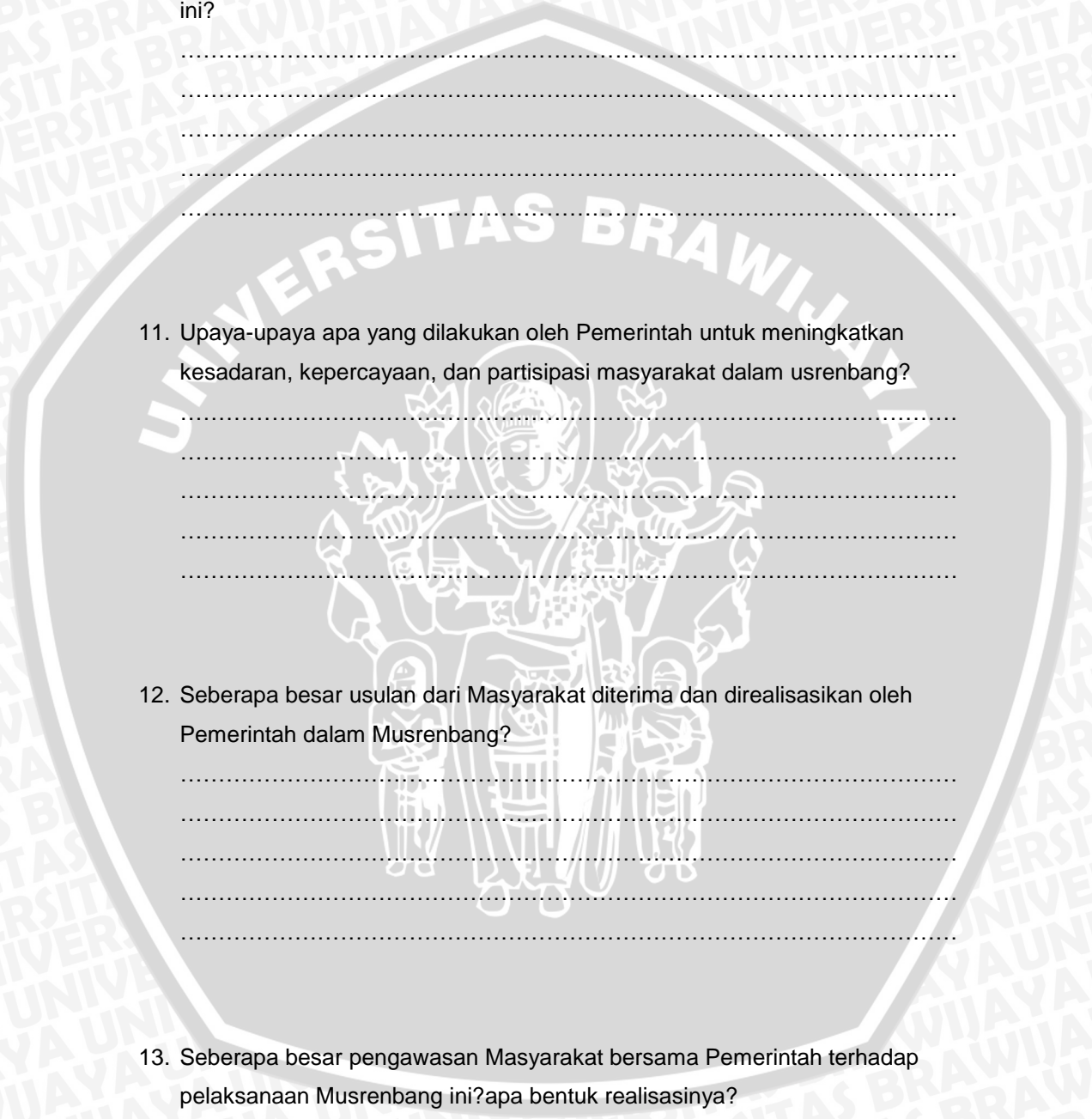
.....
.....
.....
.....

12. Seberapa besar usulan dari Masyarakat diterima dan direalisasikan oleh Pemerintah dalam Musrenbang?

.....
.....
.....
.....

13. Seberapa besar pengawasan Masyarakat bersama Pemerintah terhadap pelaksanaan Musrenbang ini?apa bentuk realisasinya?

.....
.....
.....
.....



14. Apa saja faktor penghambat dan pendukung khususnya mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang?

.....

.....

.....

.....

15. Bagamanai upaya Pemerintah Kecamatan untuk menekan faktor penghambat tersebut?

.....

.....



UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Dokumentasi Lapangan

